

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN
TINGKAT SMP DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**



Oleh:
Imron Alief
NIM: 08913086

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2011**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN
TINGKAT SMP DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**



Oleh:
Imron Alief
NIM: 08913086

Pembimbing:
Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 373/PS-MSI/Peng./XI/2011

TESIS berjudul : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGKAT SMP DI KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ditulis oleh : Imron Alief

N. I. M. : 08913086

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 24 November 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA.



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS



Nama : Imron Alief
 Tempat/tgl.lahir : Bojonegoro, 8 Juni 1964
 N. I. M. : 08913086
 Konsentrasi : Pendidikan Islam
 Judul Tesis : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN
 TINGKAT SMP DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA
 TENGAH**

Ketua	: Dr. H. Imam Effendi, MA	()
Sekretaris	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	()
Pembimbing	: Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI	(
Penguji	: Drs. H. AF Djunaidi, M.Ag	(.....)
Penguji	: Drs. H. Hajar Dewantara, M.Ag	(.....)



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2011
 Pukul : 14.00–15.00 WIB
 Hasil / Nilai : **84,50 / B**

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA




PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 976/PS-MSI/ND/XI/2011

TESIS berjudul : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENDIDIKAN KHUSUS SMP DI KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ditulis oleh : Imron Arif

NIM : 08913086

Konsentrasi : Pendidikan Islam

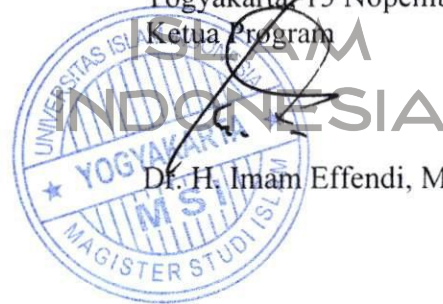
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 15 Nopember 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA

PERSETUJUAN

Tesis Judul : Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar Khusus SMP di
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Ditulis oleh : Imron Alief

NIM : 08913066

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Yogyakarta

Pembimbing

Drs. H. Hujair AH Sanaky, M.SI

**Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar
Tingkat SMP di Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah**

**Imron Alief
08913086**

ABSTRAK

Pentingnya pendidikan bagi manusia menjadi salah satu landasan utama, mengapa perencanaan pendidikan itu penting. Ditengah kondisi saat ini, dimana Indonesia sementara berada dalam proses pembangunan, tentunya sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk menjadi pengelola atau menjadi pelaksana pembangunan yang berkualitas. Maka dari itu, pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas memang sangat diharapkan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian tentang proses perkembangan pendidikan dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten. Sebagai bentuk usaha dalam melakukan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Klaten yang berkualitas. Fokus permasalahan dalam tesis ini adalah mengkaji bagaimana proses perencanaan pendidikan dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini, adalah untuk memahami kondisi lebih jauh pendidikan dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten dan untuk memahami bagaimana seharusnya proses pengembangan pendidikan di Kabupaten Klaten.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan manajemen dengan metode kualitatif. Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, penulis memfokuskan pada objek penelitian, yang antara lain ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten selaku penentu kebijakan yang mengatur bagaimana proses dinamika pendidikan berlaku di tingkat sekolah dan beberapa SMP di Kabupaten yang mewakili secara keseluruhan SMP yang ada di Kabupaten Klaten. Data diperoleh lewat metode observasi, dengan meninjau lokasi pendidikan di tingkat sekolah SMP, dokumentasi dengan menghadirkan data dalam bentuk visualisasi sekolah terkait, dan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan juga pada tingkat satuan sekolah SMP di Kabupaten Klaten

Dinas pendidikan selaku lembaga penentu kebijakan yang berlaku secara umum, menjadi patokan untuk memahami bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Klaten dalam keseriusannya untuk melakukan pembangunan bidang pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam rancangan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Dan pada tingkat SMP, proses pembuatan RPS menjadi patokan dasar untuk memahami bagaimana proses perkembangan pendidikan sekolah di tingkat SMP.

Keberhasil didapatkan dari penelitian ini, antara lain bahwa adapun dalam proses pengembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Klaten, dimulai lewat Rancangan Pengembangan Pendidikan (RPS) yang disusun oleh komite sekolah yang terdiri dari dinas pendidikan, pihak perwakilan sekolah, dan wakil dari masyarakat. Dimana hasil rancangan tersebut selanjutnya di sampaikan

pada dinas pendidikan kabupaten untuk diverifikasi. Dan kemudian selanjutnya diteruskan pada lembaga pemerintahan daerah untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan pendidikan tingkat SMP khususnya dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

Dalam proses pembangunan pendidikan, khusus pada tingkat SMP, sebaiknya dilakukan penyesuaian antara kebutuhan pada masyarakat, yang berkaitan dengan dunia perindustrian yang berkembang di masyarakat, selain itu juga pada tingkat SMP sebaiknya melakukan perbaikan mutu dan kualitas serta lebih fokus pada pembentukan siswa yang siap kerja atau siap dalam dunia akademis selanjutnya. Sehingga dengan itu, persoalan putus sekolah, karena keterbatasan biaya dapat diatasi lewat kemampuan yang dimiliki siswa selama berada dalam binaan dan bimbingan pendidikan di SMP.

Kata Kunci : Perencanaan Pendidikan, Pengembangan Pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Klaten



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

***Planning of the Developing Educational Sector
Focused on SMP in Klaten Regency
West Java Province***

**Imron Alief
08913086**

ABSTRACT

The importance of knowledge to human has been one of the main basic for the reason why does the education important. Being part of the condition nowadays, where Indonesia is under-developing, surely needs human resources to be the organizer or to be holder of the quality developing. Therefore, education to create human resources with certain quality is really expected.

So in this research, the writer focused the discussion to the growing process of basic educational focused on SMP in Klaten Regency. As one of efforts in participating the developing of educational sector with certain quality in Klaten Regency. Problem focused in this thesis is to study about the objective condition of the basic educational focused on SMP in Klaten Regency and the planning process of basic educational focused on SMP in Klaten Regency. Purpose of the research is to know more about the condition of the basic educational focused on SMP in Klaten Regency and to understand the growing process of education in Klaten Regency must be.

Method used in this research is management approach by qualitative method. In getting data of the research, the writer focused to the object of the research, which is found in Educational Department Klaten Regency as the decision making that organizes how do the educational dynamic applied in school and some of SMP in Regency which represent the whole SMP in Klaten Regency. Data found by observation method, by studying the educational location in level of SMP, documentary by presenting data in form of visualization the related school, and interview to the Educational Department party and also to the school level of SMP in Klaten Regency.

Educational Department as the decision making institution which applied generally, become a standard to understand the work of the Klaten Regency government in its seriousness to do the educational building sector as found in design of building area program Klaten Regency. And in level of SMP, the making process of RPS becomes basic standard to understand the growing of educational school process in level of SMP.

The summary found in this research, are in educational developing process, started by Educational Developing Design (RPS) which composed by school committee that consist of Educational Department, school representative,

and society representative. Where the design result of the programs that will be hold in each schools will be informed to Educational Department Regency to be verified.

In educational building process, focused on SMP, it's better to do adaptation between need of society, which related to industrial sector that is develop in society, except that in level of SMP it's better to do betterment grade and quality and be more focused in preparing a skilled student or a ready student to the next academic. So by that, a dropping out of school problem because of the financial lack can be overcome by skill that student got during the educational building and guiding in SMP.

Keywords : Planning Education, Developing Educational for SMP in Klaten



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO :

**“Pendidikan merupakan
perlengkapan paling baik untuk hari tua”**

(Aristoteles)



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā		-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-

س	Sād	.s	s (dengan titik di bawah)
ذ	Dād	.d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	.t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	.z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'		-
ق	Qāf		-
ك	Kāf		-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
----------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i

_____	<i>.dammah</i>	ditulis	u
-------	----------------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>.dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وهبنا فضلا ونعما، وارشدنا الى ما فيه

صلاحنا رحمة وتوفيقا، اللهم صل وسلم على

سيد الانبياء والمرسلين، محمد وعلى اله واصحابه

ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Tingkat SMP di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Shalawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan selain ucapan syukur alhamdulillah atas selesainya penulisan tesis ini. Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir studi penulis dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) dalam program studi Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Walaupun dalam penyusunan tesis ini bagi penulis terasa berat, namun berkat bantuan dari berbagai pihak terutama bimbingan yang diberikan oleh Bapak Drs. H. Hujair AH Sanaky. M.SI. selaku dosen pembimbing. Penulis

dengan semaksimal mungkin dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik hingga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sehubungan dengan penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku rektor dan segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Imam Effendi MA, selaku direktur Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Drs. Hujair AH Sanaky, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk melakukan telaah, koreksi, bimbingan, dan arahan kepada penulis.
4. Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten yang membantu sehingga penulis dapat menempuh studi.
5. Para guru besar dan dosen pada Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
6. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Polanharjo, SMP Negeri 1 Karangnom, SMP Negeri 1 Delanggu, SMP Negeri 1 Kebonarum dan SMP Negeri 1 Wedi di Kabupaten Klaten, beserta dewan guru dan karyawan yang telah memberikan kesempatan dan kerjasama pada penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Ibunda tercinta yang telah mengasuh, membimbing dan memberikan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

8. Isteri tercinta Emi Suyati beserta anak-anakku yang tersayang Wildan Mumtaza, Amal Azkia dan Syahrul Mubarak, yang selalu memberikan dukungan padaku untuk terus meniti karir dengan penuh setia.
9. Saudara-saudaraku yang senantiasa mendukungku dan mendo'akanku dalam menyelesaikan studi.
10. Khusus untuk murid-muridku di Madrasah Diniyah Nurul Akbar, yang telah ikut mendoakan lancarnya proses penulisan tesis ini hingga ujian.
11. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang telah memberi semangat dan membantu terlaksananya dan terselesaikannya penulisan tesis.

Akhirnya penulis hanya dapat menyampaikan do'a *jazakumullah ahsanal jaza'*, selain itu penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan keilmuan dan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

Yogyakarta, 30 November 2011

Penulis

Imron Alief

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
MOTTO.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG Pendidikan Dasar Khusus SMP.....	33
A. Pendidikan Dasar tingkat SMP.....	33

1. Pendidikan Dasar	33
2. Pendidikan Dasar khusus SMP	36
B. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar tingkat SMP	38
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP.....	38
2. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP	40
C. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Tingkat SMP	42
1. Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP	42
2. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di tingkat SMP.....	44
3. Implementasi Hasil RPS sebagai Bentuk Perencanaan Pembangunan Pendidikan tingkat SMP	45
BAB III KONDISI OBYEKTIF SMP DI KABUPATEN KLATEN	54
A. Keadaan Umum Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klaten....	54
B. Keadaan Dunia Pendidikan Dasar tingkat SMP di Kabupaten Klaten.....	59
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR KHUSUS SMP DI KABUPATEN KLATEN.....	67
A. Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten.....	67
B. Mekanisme Perencanaan Pendidikan Dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten	71
1. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)	71

2. Verifikasi Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).....	79
C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Pendidikan	84
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan (Musrenbang) RKPD	85
E. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan untuk SMP.....	86
F. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Pendidikan khusus SMP di Kabupaten Klaten	94
1. Faktor Penghambat Perencanaan dan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Klaten	94
2. Faktor Pendukung Perencanaan dan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Klaten.....	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan sebuah negara salah satunya bisa di lihat dari pembangunan yang dilakukan, di tinjau dari berbagai sektor. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang menjadi sasaran pembangunan negara, menjadi hal yang cukup istimewa. Hal ini di karenakan, pemberdayaan sumber daya manusia, mampu menjadi aset utama dalam menciptakan kemajuan suatu negara. Pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran, pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.¹

Sumber daya manusia merupakan modal dasar kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya manusia adalah agen agen aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber sumber alam, membangun organisasi organisasi sosial, ekonomi, dan politik, dan melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah suatu negara yang tidak dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak dapat menggunakan mereka secara efektif dalam ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya tidak akan dapat mengembangkan apapun². Demikian yang di sampaikan Harbinson,

¹ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Kompas, 2002) hlm ix.

² Michael Todarop. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia ke Tiga. Cetakan ke III*. Terjemh, Burhanuddin Napitupulu. (Erlangga. Jakarta, 1985) Hlm 336

sehubungan dengan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada perkembangan pembangunan di dunia ke tiga.

Oleh karena itu, bagaimana menciptakan sumber daya manusia, yang berkualitas serta mampu diandalkan dalam proses pembangunan selanjutnya, semua bergantung pada bentuk pengelolaan pendidikan yang di arahkan pada masyarakat dalam sebuah negara. Pendidikan menjadi salah satu alasan, penyebab terciptanya sumber daya yang berkualitas, karena lewat aktifitas ini, manusia mampu di ajak untuk berkreasi, menyelami proses mengembangkan potensi yang ada dalam diri seorang manusia.

Adapun pengertian pendidikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III, Pendidikan berasal dari kata *didik* v, *mendidik* v yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, redaksi kata dari pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.³ Terdapat beragam pengertian yang di berikan oleh para ahli sehubungan dengan pendidikan. Akan tetapi dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pengertian pendidikan yang telah di tetapkan oleh UU. Berikut penjelasan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi ke III. Cetakan ke III (Jakarta : Pusat Bahasa, 2002) Hlm 204

*potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.*⁴

Mengacu pada pengertian pendidikan sebagaimana yang telah diterangkan di atas lewat UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka dapat di pahami bahwa pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah bentuk perencanaan pengembangan kepribadian manusia dalam aktualisasi dirinya, yang berpatokan pada system atau aturan tentang perencanaan dunia pendidikan yang di bangun oleh negara. Dalam hal ini, tentang pendidikan di Indonesia telah di atur tentang standar pendidikan nasional. Yang merupakan sandaran dasar yang menjadi acuan dalam menggerakkan dinamika pendidikan di Indonesia. Pada muaranya pendidikan adalah proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.⁵

Pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar, yang terencana. Artinya adalah pendidikan di Indonesia tak lepas dari rancangan rancangan matang dalam mengembangkan pribadi manusia, sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mampu menampakkan eksistensinya dalam interaksinya sehari hari. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dapat di capai jika dilakukan dengan usaha maksimal yang matang dengan perencanaan.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung: Citra Umbara, 2003) Hlm 3.

⁵ Umar Abu Bakar . Kumpulan Tulisan. *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran. Pendidikan Nasional Memasuki Era Otonomi Daerah*. Dalam Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (Ed). Yogyakarta UII Press. Hlm 230

Oleh karena itu perlu dipahami sebelumnya tentang bagaimana perencanaan itu sendiri, menurut Roger A. Kaufman (Harjanto 1997-2) bahwa "Perencanaan adalah suatu proyeksi (perkiraan) tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Perencanaan sering juga disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang." Jika demikian, maka bisa dikatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan bagian yang cukup penting jika memulai pembangunan pengembangan sumber daya manusia yang sifatnya jangka panjang dan menyeluruh, atau semacam rancangan perjalanan system pendidikan untuk sebuah harapan atau tujuan untuk masa yang akan datang. Alam pendidikan harus mendapatkan perhatian yang penuh, karena pendidikan Indonesia dengan skala nasional, tentunya harus di hubungkan dengan beragam aktivitas lainnya. Hal ini diperlukan demi terciptanya hubungan yang harmonis, antara dunia pendidikan dengan sektor sektor lain yang menjadi perhatian penting pemerintah.

Pendidikan tak dapat dipungkiri merupakan bentuk investasi SDM. Investasi di pendidikan memang baru terasa hasilnya dalam jangka panjang. Tetapi hanya dengan pendidikan, harkat dan martabat bangsa ini diyakini bakal membaik. ⁶Berdasarkan paham human capital atas betapa perlunya pendidikan formal dalam menciptakan manusia manusia yang berkualitas, yang kelak mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan negara

⁶ Babun Suharto dan Zainal Abidin, *Konstruksi Ideal Pendidikan Agama Islam dalam Spektrum Global, Pertautan Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)*. (Yogyakarta; Absolute Media, 2010) Hlm 135

khususnya dalam hal ekonomi. Kita tahu bahwa proses pendidikan di Indonesia memang terus berjalan, namun sangat menyedihkan jika berbicara soal kualitas sumber daya manusia sebagai produk pendidikan Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam dinamika pendidikan di Indonesia. Selain persoalan anggaran pendidikan yang minim, pengelolaan system pendidikan seakan tak terencana dengan matang. Dan hasilnya penyimpangan pun terjadi, baik bersifat teknis, maupun nonteknis. Penyimpangan teknis bisa kita lihat pada apa yang terjadi di lapangan, semua hal yang berkaitan dengan aktifitas langsung dari proses belajar mengajar. Selanjutnya non teknis, hal ini berhubungan dengan perencanaan pendidikan, yang di kelola oleh negara yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik untuk sarana maupun prasarana pendidikan.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa, betapa negara berusaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang berkualitas, yang selanjutnya di jelaskan tentang pendidikan sebagai salah satu modal utama untuk tercapainya cita cita tersebut. Hal ini setidaknya memberikan pemahaman kepada kita bahwa, tujuan terselenggaranya negara ini, tak lepas dari bagaimana pelayanan

pendidikan yang di berikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara pada masyarakat.

Pendidikan telah menjadi hak bagi tiap tiap manusia. Di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu dari apa yang menjadi hak tiap tiap warga negara Indonesia. Hak atas pendidikan telah di atur oleh negara, dan telah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah selaku penyelenggara negara dalam mengatur serta memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang, Pada pasal 1 Amandemen UUD 1945 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya.

Modal utama dalam tercapainya pendidikan berkualitas adalah dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas. Dan salah satu masalah yang sering kita temukan dalam pengembangan pendidikan, salah satunya adalah masalah pembiayaan pendidikan. Mengingat selama ini, mandeknya laju perjalanan pendidikan di Indonesia sala satunya karena kurangnya anggaran yang di berikan pemerintah, lewat subsidi. Yang pada akhirnya menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam dalam hal ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia mengalami nasib yang cukup menyedihkan akibat minimnya anggaran dana untuk menopang kreatifitas dunia pendidikan. Anggaran 20 % untuk pendidikan seakan tak cukup untuk mendorong terciptanya efektifitas pendidikan untuk tujuan kualitas pendidikan yang di cita citakan. Padahal,

seiring berjalannya waktu, di beberapa negara maju pola pikir manusia kian pesat (khususnya jika melihat Eropa) melangkah jauh, tentunya karena perjalanan ide cemerlang mereka selalu berjalan seimbangan dengan prasarana yang di siapkan oleh pemerintah mereka sendiri. Dan justru sebaliknya, di Indonesia masyarakat sekali lagi harus bisa bersabar, perkembangan pola pikir seakan tak mampu di imbangi oleh suasana pendidikan yang tercipta di Indonesia. Pada hal jika kita mau jujur, limpahan sumber daya alam yang ada di Indonesia mampu mengobati penyakit yang menggerogoti alam pendidikan di Indonesia.

Dalam hal pelayanan pendidikan, pemerintah wajib memberikan perhatian serius khususnya pada alokasi untuk anggaran pembiayaan pendidikan. Karena, kendatipun telah di putuskan pada tahun 2000, oleh MPR tentang penetapan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun tak cukup menjadi pemecah persoalan tentang kualitas pendidikan di Indonesia.

Terkait dengan berlakunya otonomi daerah (berdasar pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) berlaku sejak 1 Januari 2001, kewenangan pemerintah Pusat untuk urusan bidang pendidikan beralih ke pemerintahan Daerah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, kewajiban bagi Pemerintah Daerah (setelah otonomi daerah berlaku) untuk mengurus bidang pendidikan di samping bidang bidang lain selain politik luar negeri, moneter, keamanan, dan fiskal, dan agama, serta kewenangan lain. Perihal di atas

berdasar pada UU No.32 tahun 2004 tentang UU Pemerintah Daerah pengganti UU No 22 tahun 1999. Selain itu terjadi perubahan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah seperti yang di atur dalam Pasal 78 UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 (telah diganti dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah), yang mengatur tentang desentralisasi kekuasaan juga diikuti oleh desentralisasi dalam pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD). Posri pembiayaan pusat terhadap APBD di atur dalam dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak (PBB, BPHTB dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun kewenangan dalam pembelanjaan keuangan daerah menjadi sepenuhnya milik daerah yang tertuang dalam dokumen APBD.⁷

Maka dari itu, baik pendidikan dasar maupun menengah di daerah bergantung sepenuhnya pada kinerja Pemerintah Daerah, berdasarkan pada rancangan pembangunan daerah. Pada pasal 167 UU No. 32 tahun 2004, di sebutkan: *“...pemerintah daerah diwajibkan melakukan peningkatan pelayanan dasar pendidikan, dengan ketentuan sekurang kurangnya 20%”*. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan, dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan

⁷Ibrahim Fahmy Badoh. Kumpulan Tulisan. Judul : Anggaran Kinerja dan Korupsi Anggaran Berbasis Sektoral “. dalam Eko Setia Budi (Ed) “ *Prospek Ekonomi Indonesia*”. (Jakarta : Iskandarsyah Institute)

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dalam UU, bahwa seperlima dari APBD di alokasikan untuk pendidikan. Berdasarkan pada hasil evaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Pusat Daerah, Departemen Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Depkeu, 2004: 108), menjelaskan bahwa terjadi penurunan anggaran belanja untuk tingkat nasional pada bidang pendidikan sejak tahun 2001 hingga 2002. Dengan rasio pengeluaran pada sector pendidikan terhadap penurunan pembangunan turun dari 22,46% pada tahun 2001 menjadi 20,68% pada tahun 2002.

Desentralisasi sebagai usaha pemberian wewenang dari pusat ke daerah, ternyata tak mampu memberikan hasil yang baik selama ini. Sentralisasi justru tetap menjadi mode (kendati tak menjadi system), yang masih berlaku dalam hal alokasi anggaran pendidikan di daerah. Padahal keberuntungan untuk Pemerintah Daerah khususnya dalam mendobrak produktifitas dalam berbagai sektor di daerahnya telah terbuka setelah adanya otonomi daerah. Yang dengan itu, pemerintah setiap daerah sanggup melakukan pemanfaatan kondisi dan budaya serta potensi potensi alam yang dimilikinya, maka manajemen pendidikan akan beragam sesuai dengan tuntutan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di daerahnya.⁸ Demikian dijelaskan H.A.R. Tilaar, sehubungan otonomi daerah perihal pendidikan.

⁸ H.A.R. Tilaar. Perubahan Sosial dan Pendidikan, *Pengantar Pedagogik Transformasi untuk Indones* (Jakarta; Grasindo, 2002) Hlm 486.

Kabupaten Klaten sebagai salah satu kawasan yang tengah berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, pasca otonomi daerah berlaku. Pemerintah Kab Klaten harus berfikir lebih keras lagi, mengingat pelimpahan wewenang dari pusat ini. Dalam hal ini, pendidikan termasuk sebagai tugas yang harus di kelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Termasuk untuk alokasi anggaran pendidikan 20%, dengan tentunya di sesuaikan dengan keuangan daerah Kabupaten Klaten sendiri. Dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar di Kab Klaten mengalami masalah yang cukup menyedihkan, terjadinya ketak merataan tingkat kualitas dan kuantitas untuk tingkat pendidikan dasar menjadi salah satu masalah besar dalam mengembangkan mutu sumber daya manusia di Kab Klaten. Khusus di beberapa lokasi di Kab Klaten, sudah bukan menjadi hal yang aneh jika menyaksikan sebuah sekolah dasar atau sederajatnya yang sangat sepi peminat. Bahkan tak jarang untuk beberapa sekolah harus dilakukan regrouping, sebagai satu satunya jalan keluar untuk tetap mempertahankan sebuah pendidikan dasar di Kab Klaten.

Tentu sangat aneh, jika di dibandingkan dengan anggaran yang seharusnya dikucurkan (berdasarkan UU) malah menyisakan sebuah lembaga pendidikan yang sangat menyedihkan. Dan justru sekolah sekolah swasta justru menjadi sasaran para orang tua untuk kelanjutan pendidikan anak anak mereka. Sekilas mungkin kita akan berasumsi, bahwa sarana dan prasarana menjadi alasan sebuah sekolah dasar atau sekolah menengah pertama sepi peminat, yang berakibat pada hilangnya semangat atau ruh pendidikan di sebuah lembaga

pendidikan. Atau bahkan karena ada faktor faktor administrative tertentu sehubungan dengan anggaran pendidikan ataukah karena kurangnya perencanaan yang matang sehubungan alokasi dana 20% APBD untuk pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, berikut ini rumusan masalah yang menjadi fokus kajian :

“ Bagaimana proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar khususnya SMP di Kabupaten Klaten”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk memberikan gambaran tentang seperti apa proses perencanaan pendidikan dasar khusus SMP Kabupaten Klaten

Berikut, manfaat atau kegunaan dari penelitian yang di lakukan ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dunia pendidikan khususnya pada tingkat SMP.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan pembangunan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di tingkat satuan sekolah khususnya SMP di Klaten.

3. Dalam bidang akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah tentang kajian perencanaan pembangunan pendidikan dasar khususnya SMP pada tingkat Kabupaten.

D. Telaah Pustaka

Sehubungan dengan penulisan penelitian ini, maka telah penulis jumpai karya tulis yang membahas tentang anggaran pendidikan dasar yang di kelola oleh pemerintah daerah.

Dalam tesis Muh. Juhad, yang berjudul, “Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah (Kajian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)”⁹ menjelaskan tentang alokasi anggaran APBD untuk pendidikan dan proses perencanaan pembiayaan pembangunan pendidikan yang di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten Lombok Timur NTB, serta masalah masalah dalam proses belajar mengajar yang seringkali mewarnai dunia pendidikan di Lombok Timur misalnya pada persoalan sarana dan prasarana yang sangat kurang. Dijelaskan pula kemampuan wali murid yang sangat minim dalam hal perhatian untuk membantu anak anaknya dalam minat baca buku. Dalam hal penopang pembangunan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, APBD ternyata kalah bersaing dengan Block Grant (DBEP-ADB, UNICEF, APBN).

⁹ M. Juhad. “Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Berdasarkan Kemampuan Daerah (*Kajian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Daerah Kabupaten Lombok Timur, NTB*). (Program Pasca Sarjana Univesitas Brawijaya, Malang, 2007) Hlm 127

Tesis M. Juhad, sangat membantu sebagai pendukung dalam tulisan ini, kendati focus dalam tulisan ini berbeda terbatas pada Pembangunan Pendidikan Dasar, yang di sesuaikan dengan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Sementara Tesis Karya M. Juhad menyorot tentang pendidikan dasar dan menengah di Kab Lombok Timur NTB.

Disamping itu terdapat beberapa referensi yang menjadi sumber teoritis dalam Tesis ini, adalah pandangan Philips H. Coombs dalam karyanya yang berjudul "*Apakah Perencanaan Pendidikan itu*" (1987:28-29), tentang 5 proposisi yang harus di kembangkan dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pendidikan, antara lain adalah :

- a) Pembangunan pendidikan harus menggunakan prespektif jangka panjang,
- b) Perencanaan pembangunan pendidikan harus lebih terperinci
- c) Perencanaan pembangunan pendidikan harus di integrasikan dengan rencana ekonomi yang luas dalam pembangunan masyarakat (khususnya untuk ekonomi daerah)
- d) Perencanaan pembangunan pendidikan harus merupakan suatu kegiatan integral pengelolaan pendidikan
- e) Perencanaan pembangunan pendidikan harus memperhitungkan segi kualitatif.¹⁰

Dalam hal ini, penulisan tesis ini, akan menjadikan 5 proposisi Coombs, dalam mempelajari bentuk rancangan tentang anggaran pembiayaan pendidikan daerah.

¹⁰ Philips H Coombs, *Apakah Perencanaan Pendidikan itu*. Terjem, Istiwidayanti. (Diterbitkan Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris. Jakarta, 1987) Hlm 28 - 29

Terkait dengan bentuk perencanaan pendidikan, menurut Vembriarto dalam karyanya "*Pengantar Perencanaan Pendidikan*", bahwa terdapat beberapa unsur yang dalam perencanaan pembangunan pendidikan antara lain, antara lain adalah *Pertama*, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis; *Kedua*, proses pembangunan pendidikan; *Ketiga*, prinsip epektifitas dan efisiensi; *Keempat*, kebutuhan serta tujuan murid dan masyarakat. Dalam hal ini berbicara tentang metode perkembangan dari waktu ke waktu, dalam mengawasi bentuk perkembangan pendidikan. Dalam proses pembangunan yang maksimal dibutuhkan bentuk pembiayaan yang jelas dengan mengacu pada peningkatan ekonomi yang menunjang. Dan dalam tujuannya mampu memberikan pengaruh secara maksimal bagi kehidupan masyarakat serta khususnya bagi para peserta didik dalam sebuah institusi pendidikan.¹¹

Mengingat tulisan yang mengangkat tema tentang anggaran pembiayaan untuk pendidikan dasar masih kurang, maka sejenak penulis agak kesulitan dalam menemukan referensi.

E. Kerangka Teori

Dalam menyusun langkah langkah perencanaan pembangunan bidang pendidikan,

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan diartikan sebagai langkah langkah yang di tempuh dengan sistematis untuk mampu mencapai tujuan sebuah kegiatan, aktifitas,

¹¹ Vembriarto. *Pengantar Perencanaan Pendidikan* (Yogyakarta; Andi Offset) Hlm 40.

ataupun sebuah lembaga. Menurut Hani Handoko, *Manajemen*, 1991, perencanaan meliputi :

- a. Pemilihan dan Penetapan tujuan organisasi
- b. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, papan, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini, perencanaan merupakan langkah awal atas segala sesuatu dalam proses mencapai tujuan akhir kegiatan. Pun dalam pengertian lain, perencanaan pada dasarnya sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang di kehendaki.¹²

Dalam UUD No 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.¹³

Salah satu faktor yang pendukung keberhasilan suatu pembangunan, salah satunya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Khususnya pada pembangunan bidang pendidikan dasar di daerah. Dan dengan terciptanya desentralisasi, menyebabkan pemerintah daerah bergantung sepenuhnya pada keuangan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

¹² Ginanjar Kartasmita, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Cet-XXI. Pengantar: Bintoro Tjokroamidjojo. (Jakarta: LP3ES, 1997). Hlm 48

¹³ www.bappenas.go.id. 2008. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. PUSDATIN BAPENAS.

Berdasarkan pada UUD No 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, disebutkan perencanaan pembangunan sebagai sebuah sistem sehingga terbentuk sebuah sistem pembangunan nasional. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan sistem pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

2. Pendidikan dasar

Pendidikan merupakan kebutuhan primer dalam sebuah komunitas, jika melihat tingkat kolektifitas masyarakat yang dinamis. Fungsi pendidikan menjadi perhatian utama, untuk mampu menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi tingkat produktifitas manusia dalam mengolah pemikirannya. Dinamika masyarakat setidaknya menjadi perhatian khusus dunia pendidikan. Jadi keberadaan pendidikan yang tampil dalam wujudnya sebagai lembaga, atau organisasi sangat di butuhkan untuk mampu menata pola fikir masyarakat. Kendati efektifitas tak nampak secara spontanitas, namun ruang pendidikan yang telah di kemas dalam rupa yang berjenjang, di harap mampu membantu perkembangan pola fikir peserta didik.

Menatap inti dari pendidikan dengan pendekatan filosofis, oleh para Rasionalis memberikan peranan yang sangat penting bagi akal budi (rasio) manusia. Untuk para penganut filsafat nilai, dengan berpandangan bahwa

kehidupan manusia adalah perwujudan dari nilai nilai abadi.¹⁴ Pada Konvensi Pendidikan Islam pertama di Universitas King Abdul Aziz di Mekaah pada tahun 1977, masalah gambaran manusia menurut Islam menjadi salah satu topik yang menarik. Di sadari bahwa pendidikan Islam haruslah di dasarkan kepada pandangan manusia menurut Islam.¹⁵ Bahwa dengan akal budi sebagai instrument berfikir, manusia mampu memberikan kemajuan dalam hal perkembangan manusia.

Dari semua bentuk pandangan filosofis tentang manusia, maka bisa di katakan bahwa pendidikan semacam ruang spektrum yang memberikan kesempatan manusia untuk mengembangkan pola fikir hingga proses pengalaman dalam menciptakan kreasi kehidupan manusia di muka bumi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang di tempuh selama masa 6 tahun SD/MI hingga 3 tahun untuk pendidikan di SMP / Mts. Pendidikan dasar merupakan satu tahap penting dalam jenjang pendidikan anak. Dari sinilah awal yang menentukan perkembangan pendidikan anak selanjutnya.

3. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar

Mengetahui beragam persoalan seputar dunia pendidikan di Indonesia, dari perkara kecil hingga besar, maka dapat dikatakan bahwa hal hal mendasar yang menjadi halangan terberat dalam tercapainya tujuan pendidikan adalah karena kurang perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada pendidikan dasar. Dengan lebih memprioritaskan

¹⁴ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. (Jakarta ; PT Grasindo, 2002) Hlm 138

¹⁵ H.A.R. Tilaar. 2002. *Perubahan Sosial*.....-----hlm 185

kualitas pendidikan untuk anak-anak di tingkat pendidikan dasar, setidaknya mampu menciptakan pondasi yang kokoh yang akrab dengan alam pendidikan yang kelak mampu melahirkan manusia-manusia yang berkualitas pula, yang tentunya menjadi asset yang paling berharga bagi daerah maupun dalam lingkup negara. Perencanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional yang mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi sosial budaya dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.

Perencanaan pendidikan sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pendidikan akan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Perencanaan dapat membantu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan diperlukan pengetahuan dan kemampuan dari para pelaksananya, perlu pemahaman fungsi-fungsi manajemen yang lain di antaranya kemampuan mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan. Maka dari itu maka dapat di pahami, bahwa perencanaan pembangunan pendidikan adalah penggunaan analisis

rasional dan sistematis terhadap proses pembangunan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan pelajar dan masyarakat.¹⁶ Penggunaan metode yang baik serta tersistematis dalam menyusun perencanaan pembangunan pendidikan mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam hal proses pembangunan pendidikan untuk saat saat yang akan datang yang bersifat jangka panjang. Dan untuk menghindari kesalahan pemahaman antara tiap tiap lembaga pemerintahan yang menangani persoalan pendidikan hingga persoalan rencana pembiayaan proses pendidikan.

Sejak masa orde baru pada tahun 1984, telah di galakkan program pendidikan 6 tahun, dan tahun 1994 pemerintah kembali menggalakkan program pendidikan dasar 9 tahun. Kebijakan pemerintah orde baru ini, merupakan rangkaian pengembangan bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang mencakup jenjang pendidikan dari SD/MI hingga SMP/MTs. Dari berbagai kebijakan untuk pemerintah, menurut Wahyu Handoyo dkk. UNSFIR (2005) bertujuan untuk menciptakan akses secara universal dan berkualitas. Pada tingkat sekolah dasar, bertujuan untuk menciptakan akses dengan kelompok rentan dan terpencil serta pada tingkat makro berbicara tentang kualitas. Untuk tingkat SMP, mengutamakan penjaminan pendidikan usia SMP secara universal dengan tetap memperhatikan kelompok marjinal.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Keuangan Daerah.

¹⁶ Philips H Coombs, *Apakah Perencanaan Pendidikan itu*. Terjem, Istiwidayanti. (Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris. Jakarta, 1987) Hlm 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di singkat APBD, merupakan rancangan atau daftar perencanaan untuk pendapatan atau pembiayaan daerah untuk masa waktu tertentu atau dalam waktu selama setahun.

Menurut Suparmoko, Anggaran adalah daftar atau pernyataan yang terperinci tentang pendapatan dan belanja negara yang di harapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun.¹⁷ Sementara itu merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, menurut UU No 33 Tahun 2004, tentang pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain. Dan pembiayaan bersumber dari sisa perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan dan hasil sumber daya alam daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang bersumber dari dalam wilayah suatu daerah tertentu dengan mengacu pada aturan aturan yang telah di tetapkan. Misalnya hasil atas pengelolaan Sumber Daya Alam ataupun pemanfaatan Sumber daya Manusia. Sementara itu dana perimbangan merupakan kucuran dana dari pusat

¹⁷ Soeparmoko, *Keuangan Negara teori dan Praktek*. (Yogyakarta; BPFE, 1991) Hlm 49

sehubungan dengan otonomi daerah, yang nantinya terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari semua laporan tentang rancangan APBD serta sumber sumber lain untuk pengembangan daerah, pendidikan menempati prioritas utama. Dengan anggaran 20 % untuk pendidikan di harap tujuan pendidikan sebagaimana yang di cita citakan dalam pembukaan UUD 45 bisa terkabulkan. Dan tentunya kinerja pemerintah daerah di pertaruhkan khususnya dalam melakukan koordinasi untuk tiap tiap lembaga pemerintahan dalam usahanya untuk merencanakan pengembangan pendidikan yang bersandar pada APBD dalam hal pembiayaan pendidikan. Berdasarkan UUD 1945 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20 % dari APBN dan APBD. Pembiayaan pendidikan sebesar 20 % itu memang harus di penuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Kendati sejumlah daerah telah mengklaim telah mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan. Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru juga di masukkan di dalamnya, sehingga anggaran di tingkat sekolah menjadi sama saja. Di sekolah sekolah negeri, sebagian besar dana yang di himpun dari masyarakat juga di pergunakan untuk menambah kesejahteraan guru dan hal hal yang tidak ada kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.¹⁸

¹⁸ Indra Bastian. Akuntansi Pendidikan. (Erlangga, 2006). Hlm 162

Untuk menghindari hal di atas, dalam melakukan perencanaan pengembangan pendidikan, setidaknya menurut Usman Abu Bakar, bahwa terdapat tiga diskursus yang harus saling bertemu untuk menghindari misimplementasi. Antara lain adalah hubungan fungsional antara Dinas Pendidikan dengan Pemda, konsolidasi internal di tingkat Dinas Pendidikan, dan penggelontoran dana beasiswa dan peningkatan SDM, serta Pemerintah Daerah harus membangun kerja sama dengan badan badan sosial yang ada.¹⁹

Untuk APBD Kabupaten Klaten, anggaran pendidikan yang sifatnya belanja langsung adalah Rp 13 M. Selain itu terdapat pula bantuan social untuk pendidikan Kabupaten Klaten sekitar Rp 8 M, serta dana hibah yang bernilai Rp 54, M.

5. Anggaran Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar

Kab Klaten, untuk tingkat pendidikan dasar khususnya untuk lembaga pendidikan di Klaten, berdasarkan laporan Diknas tahun 2008/2009 terdapat **880** sekolah SD / MI dan **131** SMP / MTs. Dari sekian jumlah lembaga pendidikan untuk pendidikan dasar, sekolah dasar ,mengalami nasib yang menyedihkan. Yang dengan terpaksa harus di “merger”. Penggabungan (Regrouping) tersebut dilakukan mengingat minimnya jumlah siswa, yang tak melebihi 81 siswa untuk satu unit sekolah dasar.

¹⁹ Umar Abu Bakar, Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Kumpulan Tulisan. *Pendidikan Nasional Memasuki Era Otonomi Daerah*, dalam Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian. (Yogyakarta ; UII Press,2010) Hlm 236

Sebagaimana yang di lansir oleh solopos.com /2010, menurut Kasi Sarana Prasana Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sudirno mengatakan, berdasarkan pendataan terakhir dan masukan dari UPT Dinas Pendidikan di kecamatan, sebanyak 20 hingga 30 SD dinilai perlu dan memungkinkan untuk di regrouping. Bahkan menurutnya telah tersedia anggaran 10 Trilyun untuk mendukung proses regrouping tersebut. Dari hasil laporan tersebut, bisa di katakan bahwa kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan di daerah dengan menarik minat masyarakat untuk bersekolah di pendidikan negeri, khususnya Kab Klaten masih kurang. Kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk wilayah pendidikan dasar di Kab Klaten menjadikan kualitas dan tingkat kuantitas lembaga pendidikan di Kab Klaten menjadi tak merata. Setidaknya pemerintah Kab Klaten harus lebih bekerja keras lagi, mengingat jika di dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun meningkat. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dari tahun 2008 ke 2009 peningkatan penduduk naik sebesar 0,29% .

Jika demikian tentunya, pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus lebih kreatif lagi untuk memanfaatkan anggaran 20% untuk pendidikan, yang di sesuaikan dengan keuangan daerah Kabupaten Klaten.

Pada tahun 2009 sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sebanyak 1.303.910 jiwa atau naik sebesar 0,26 % bila dibandingkan tahun 2008 yang sebanyak 1.300.494 jiwa. Pada tahun 2009

penduduk laki-laki berjumlah 637.939 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 665.971 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2008 sebesar 1.984 jiwa/Km², meningkat menjadi 1.989 jiwa/Km² pada tahun 2009 atau naik 0,25 %.²⁰

Adapun tingkat perekonomian untuk tahun 2008 ke 2009, meningkat dari 3,99% tahun 2008 dan 4,45% pada 2009. Besarnya PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2007 sebesar Rp.4.394.688,02 Juta, dan pada tahun 2008 sebesar Rp.4.570.036,07 Juta, atau mengalami kenaikan sebesar 3,99%. Sedangkan pada tahun 2009 besar PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.782.654,31 juta, apabila dibandingkan dengan besar PDRB pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.570.036,07 Juta mengalami kenaikan sebesar 4,45 %.

Dari tahun 2004 LPMI menghitung bahwa anggaran ideal per siswa per tahun adalah Rp.1.174.700,00 per siswa SD dan Rp.2.283.000,00 per murid SMP. Ini sudah memperhitungkan aspek aksesibilitas, peningkatan kualitas, bantuan untuk kelompok miskin dan daerah miskin, dan administrasi dan pengelolaan.

Renstra Diknas 2005-2009 yang konsisten dengan prinsip desentralisasi dan otonomi akan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Diknas perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam

²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun 2009. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

pelayanan pendidikan, seperti dalam penetapan kebijakan nasional, standarisasi nasional pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan koordinasi sesuai dengan delegasi fungsi, urusan, dan tanggungjawab dari masing-masing tingkat pemerintahan, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Adapun sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pembiayaan Sekolah (RAPBS) yang bersumber dari APBD.

Dalam era otonomi daerah, pembaharuan cara pandang untuk pendidikan khususnya dengan melihat dunia pendidikan sebagai bagian dalam proses jangka panjang pembangunan daerah, harus di lakukan.

Dengan memahami bahwa pendidikan merupakan human investment yang membutuhkan rancangan dan biaya yang memadai untuk pertumbuhan dan mendukung proses demokratisasi dalam sistem kehidupan di Indonesia. Dengan demikian tentu akan memberikan pengaruh pada tingkat kualitas pendidikan Indonesia, khusus pada segi input, process, product, hingga out come. Hal ini di sesuaikan dengan tingkat perubahan masyarakat yang terus berubah dalam dinamikanya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menampilkan langkah langkah dalam memudahkan mencapai tujuan karya tulis ini.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan dalam mendekati objek kajian adalah, pendekatan manajemen. Secara tidak langsung kegiatan manajemen diartikan sebagai proses pengintegrasian sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan sesuatu.²¹

Istilah manajemen terkadang diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang

²¹Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 3

sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi.²²

2. Jenis Penelitian

Sedangkan lewat metode penelitian kualitatif di lakukan untuk menangkap dan memahami fenomena pendidikan di Kabupaten Klaten, sehubungan dengan objek kajian dari karya tulis ini. Pendekatan kualitatif, dilakukan dalam memahami segala jenis data, informasi dari berbagai narasumber yang di temukan peneliti di lapangan.

Metode kualitatif ini pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan permasalahan secara komprehensif, holistic dan integrative serta mendalam melalui kegiatan mengamati orang lain dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang keadaan di sekitarnya. Sehingga penelitian di maksudkan untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan hipotesis.²³

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.²⁴ Dalam hal ini, bagaimana proses perencanaan pembangunan pendidikan dasar khusus

²²Nanang Fattah, *landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2000), hlm. 1.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung; Alfabeta, 2006) Hlm 399.

²⁴ Santoso & Tjiptono, 2002, 79)

SMP pada lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Menurut Manase Mallo (1986:149). Populasi bisa berupa lembaga, individu, kelompok, dokumen, atau konsep.²⁵

Sampel adalah semacam miniatur (mikrokosmos) dari populasinya,²⁶ adapun bentuk sampel dalam penelitian ini adalah hasil perencanaan pengembangan pendidikan di lima sekolah yaitu SMP Negeri 2 Polanharjo, SMP Negeri 1 Karangnom, SMP Negeri 1 Delanggu, SMP Negeri 1 Kebonarum dan SMP Negeri 1 Wedi masing masing di Kabupaten Klaten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data di lapangan, sehubungan dengan objek kajian dalam tulisan ini. Dalam hal ini, pengumpulan data yang dimaksud adalah untuk memperoleh data mentah, yang kelak akan di analisa demi mendapatkan informasi atau data yang lebih valid. Peneliti berdasar pada 3 metode, yaitu : Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

a. Metode Observasi, di lakukan dengan pengamatan langsung pada lokasi objek kajian, untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kajian karya tulis ini. Observasi dalam hal ini di pahami sebagai metode pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yang

²⁵ Manase Mallo dskk. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Penerbit Karunia Utama. Hlm 149.

²⁶ Ibid hlm 80

meliputi kegiatan pemusatan penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera.²⁷

Lewat metode observasi, penulis akan melihat secara langsung bagaimana bentuk proses perencanaan pendidikan yang ada di sekolah sekolah yang akan menjadi lokasi atau objek penelitian..

- b. Metode Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrument tertentu untuk mendapatkan data. Perolehan data bisa dilakukan lewat dokumen atau catatan, transkrip, buku, dll yang bersifat variabel, artinya masih berhubungan dengan objek kajian yang tengah di teliti. Dan juga dengan menggunakan instrument media rekam.

Metode dokumentasi ini penulis maksudkan untuk mencermati persiapan pelaksanaan proses pembangunan pendidikan termasuk hal hal yang berhubungan dengan proses penelitian dengan materi penelitian yang terdapat di lapangan, khususnya tentang perencanaan pendidikan SMP di Kabupaten Klaten.

- c. Metode Wawancara, merupakan metode yang dilakukan dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁸ Wawancara merupakan aktifitas yang bersifat dialogis dan langsung, metode ini dilakukan saat berhubungan dengan narasumber yang telah menjadi target, sehubungan dengan tujuan penelitian.

²⁷ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta; Rineka Cipta, 1998) Hlm 133

²⁸ Sutrisno Hadi. *Metode Research II*. (Yogyakarta; Andi Offset, 2000) Hlm 193

Metode wawancara digunakan untuk menggali pendapat beberapa warga dalam sekolah dan warga luar sekolah seperti komite sekolah, hingga pada Tingkat Pemerintahan di Kabupaten Klaten secara mendalam terhadap persiapan proses perencanaan pembangunan pendidikan secara mendalam terhadap persiapan.

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih diperhatikan dari pada hanya sekedar hasil, dan penelitian kualitatif lebih mengutamakan data fakta lapangan, tanpa melakukan akumulasi data berdasarkan angka ataupun presentase, dan cenderung bersifat deskriptif.

Analisis Interaktif yang dilakukan melewati 3 proses, antara lain :

- a. *Reduksi Data*, yaitu dengan melakukan pemilihan, penyederhanaan data, pengabstraksian data, pengelompokan data (klasifikasi data). Pada tahap ini, data yang telah di pilih di kelompokkan ditandai, dan bisa saja berlangsung selama proses pengambilan data di lapangan.
- b. *Penyajian Data*, pada tahap ini, data yang telah ada di sederhanakan dengan tersistematis, untuk memudahkan pemahaman atas data pada tahap awal di atas.
- c. *Verifikasi atau Penyajian Kesimpulan*, tahap ini menjadi bagian dari analisa data yang terakhir. Tahap ini dilakukan dengan melihat

kembali atau memeriksa kembali hasil analisa dari 2 langkah di atas, yang di sesuaikan dengan fakta yang di peroleh di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan Tesis ini, penulis menyajikan sistematika penulisan Tesis dengan terstruktur. Untuk memudahkan dalam memahami penulisan tesis nantinya.

Pada Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menyajikan semua hal yang berhubungan dengan langkah-langkah awal dalam penelitian nantinya.

Bab II, berisi kajian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP. Pada bab ini, penulis menyajikan kajian seputar perencanaan pembangunan pendidikan yang menjadi alat bagi penulis dalam menelaah proses perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten.

Bab III, berisi tentang kondisi objektif SMP di Kabupaten Klaten. Bab ini menguraikan seputar kondisi riil dunia pendidikan secara umum yang ada di Kabupaten Klaten, kemudian keadaan dunia pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Klaten yang ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Bab IV, tentang pembahasan dan analisis tentang proses perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten. Bab ini penulis menguraikan bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam menjalankan proses perencanaan pendidikan dasar khusus SMP dalam mendapatkan hasil atau produk Sumber Daya Manusia

(SDM) yang bisa diandalkan, atau setidaknya mampu untuk kembali meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya atau pada jenjang pendidikan dasar menengah yang dalam hal ini adalah SMP dan sederajatnya.

Bab V, berisi tentang penutup, yang mencakup kesimpulan beserta saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR TINGKAT SMP

A. Pendidikan Dasar tingkat SMP

1. Pendidikan Dasar

Istilah pendidikan (*education*) dianggap memiliki makna yang lebih luas dari pada penggunaan istilah pengajaran (*teaching*), maupun pelatihan (*training*). Makna pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik, yang dilakukan secara sadar sehingga diharapkan proses tersebut terarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu tentunya sudah banyak ahli pendidikan yang telah memberikan makna tentang pendidikan. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran, pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.¹

Crow (dalam Supriyatno, 2001) mengatakan bahwa pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-

¹ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. ix.

elemen yang ada disekitarnya. Pendidikan juga mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai akibat dari partisipasi individu dalam pengalaman-pengalaman dan belajar.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.³

Dari definisi tentang pendidikan yang telah disebutkan, definisi pendidikan dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”.⁴

Berdasar pada pengertian pendidikan yang disebutkan dalam UU No 20 Tahun 2003 di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan sebuah ruang untuk mengembangkan potensi yang diri manusia, ditinjau dari berbagai sudut positif yang ada dalam diri manusia. Sebagai bentuk kesadaran dalam wujud perencanaan yang matang demi pengembangan dan

² Supriyatno, 2001

³ Kamus Bahasa Besar Indonesia 1991

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara,2003), hlm. 3.

pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri atas beberapa bentuk, yaitu bidang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lainnya yang sederajat selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan dasar ini akan menjadi pondasi untuk menunjang keberhasilan pendidikan jenjang yang lebih tingginya yaitu di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, bahwa taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas; meningkatnya rata-rata lama sekolah; dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan massa (*mass education*) atau *education for all* yang diwajibkan diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu (*compulsory education*). Pendidikan dasar (*basic education*) tidak sama dengan sekolah dasar (*primary/elementary school*). Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi

kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menunjukkan bahwa peserta didik dalam usia pendidikan dasar harus dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya tanpa terputus selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di tingkat SD dan tiga tahun di tingkat SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat. Dalam wajib belajar sembilan tahun, semua lulusan SD enam tahun secara otomatis harus bisa ditampung di jenjang SMP sebagai bagian dari program pendidikan dasar sembilan tahun.⁵

2. Pendidikan Dasar khusus SMP

Pendidikan dasar khusus SMP merupakan bidang pendidikan yang khusus membahas tentang ruang atau kondisi pendidikan pada tingkat SMP. Pada bidang ini, penanganan perihal masalah pendidikan difokuskan atau mengutamakan program-program pendidikan untuk pengembangan dan pembangunan pendidikan SMP.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan lembaga pendidikan yang merupakan kelanjutan dari Sekolah Dasar dan sederajat, sebagai bagian dari tingkat Pendidikan Dasar. SMP merupakan satuan pendidikan yang bertugas memberikan bekal kepada siswa agar setelah lulus mereka mampu melanjutkan ke pendidikan menengah atau pendidikan yang lebih tinggi. Di SMP memang diberikan pula keterampilan dasar. Tetapi karena kecil kemungkinan seorang anak lulusan SMP siap memasuki dunia kerja, maka yang paling utama dari penyelenggaraan pendidikan SMP adalah menyiapkan

⁵ <http://m-ali.net/?p=73> Diakses tanggal 13 Mei 2011 Pukul 12:07 WIB

mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, apakah SLTA umum (SMA/MA) maupun kejuruan (SMK/MAK).

Dalam prosesnya Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP).

Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Dalam kebijakan Direktorat SMP (2009), Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan semata-mata untuk mencapai angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi lebih jauh dari itu yaitu untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Demikian juga dalam pembinaan pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat bukan sekedar mengejar tingginya angka partisipasi dalam memperoleh layanan pendidikan dasar, tetapi harus lebih ditingkatkan ke arah pendidikan dasar yang bermutu.⁶

⁶ Belajar Untuk Masa Depan. *Kebijakan Teknis Direktorat PSMP 2009*

Di beberapa negara, SMP berlaku sebagai jembatan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah atas. Namun istilah tersebut dapat dipergunakan secara berbeda di beberapa negara, kadang-kadang saling berbanding terbalik. Untuk negara-negara yang mempergunakan bahasa Cina, khususnya di Cina, Taiwan dan Hong Kong, juga di Italia (= scuola media), SMP berkonotasi yang sama dengan *secondary school*.

Oleh karenanya di beberapa istilah di pemerintahan dan institusi pendidikan, SMP adalah nama lain dari "*junior high school*", yang pada dasarnya suatu sekolah setelah sekolah dasar. Penamaan sebagai *junior high* mulai muncul sekitar tahun 1909 pada waktu pendirian sekolah Indianola Junior High School di Columbus, Ohio. Sedangkan konsep penamaan sebagai *middle school* mulai diperkenalkan pada tahun 1950 dari Bay City, Michigan.⁷

B. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar tingkat SMP

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP

Sehubungan dengan bentuk pengembangan potensi diri manusia. Maka Perencanaan disini maksudkan sebagai bentuk perencanaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia khususnya dalam dunia pendidikan.

Pengertian perencanaan merujuk pada Wedgewood-Oppenheim adalah, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argument

⁷ Kementrian Pendidikan Nasional RI. 2010. <http://www.kemdiknas.go.id/satuan-pendidikan/sekolah-menengah-pertama.aspx>). Diakses tanggal 14 Mei 2011, pukul 02.45 WIB

logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan.⁸

Adapun pengertian perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakatnya.

Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta pemikiran sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan sumber meliputi; sumber manusia, material, uang dan waktu.⁹

Dengan demikian secara umum memudahkan untuk mencapai suatu komitmen atau kesepakatan, sehingga kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dapat dihindarkan, langkah awal yang ditempuh adalah mengemukakan pengertian perencanaan pengajaran. Upaya untuk dimaksud itu dilakukan dengan mengemukakan beberapa batasan atau definisi.

Philips H. Coombs dalam karyanya yang berjudul “*Apakah Perencanaan Pendidikan itu*” (1987:28-29), tentang 5 proposisi yang harus di kembangkan dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pendidikan, antara lain adalah :

a) Pembangunan pendidikan harus menggunakan prespektif jangka panjang,

⁸ Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. 2003. Riyadi dan Brata Kusumah. Hlm 1.

⁹ M.Sobri. 2010. Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP 1 Biromaru Kabupaten Sigi. Tesis. UII Yogyakarta. Hlm 15

- b) Perencanaan pembangunan pendidikan harus lebih terperinci
- c) Perencanaan pembangunan pendidikan harus diintegrasikan dengan rencana ekonomi yang luas dalam pembangunan masyarakat (khususnya untuk ekonomi daerah)
- d) Perencanaan pembangunan pendidikan harus merupakan suatu kegiatan integral pengelolaan pendidikan
- e) Perencanaan pembangunan pendidikan harus memperhitungkan segi kualitatif.¹⁰

Dalam pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas, sebagaimana yang telah dibahas diatas. Pembangunan dalam dunia pendidikan, memang harus mendapat perhatian yang penuh. Pembangunan pendidikan adalah salah satu usaha dalam memajukan kualitas pendidikan dalam sebuah kawasan. Pembangunan dengan penuh perencanaan adalah bentuk usaha maksimal sebagai wujud nyata atas tercapainya dunia pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

2. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hartoto, Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal (Hartoto, 2008: 4). Optimalisasi dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran dalam dunia pendidikan, merupakan usaha yang sangat penting.pencapaian yang optimal itu tidak akan mampu terlaksana dengan baik jika tidak dengan membuat rancangan atau perencanaan yang matang.

¹⁰ Philips H Coombs, *Apakah Perencanaan Pendidikan itu*. Terjem, Istiwidayanti. (Diterbitkan Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris. Jakarta, 1987) Hlm 28 - 29

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹¹ Sebagai suatu alat ukur dalam perbandingan antara hasil yang dicapai dengan harapannya. Dengan perencanaan diketahui hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas program dan alokasi sumber.¹²

Secara fungsional bentuk perencanaan pendidikan dasar di tingkat SMP ini, untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan pendidikan di tingkat SMP. Dengan adanya hal semacam ini, koordinasi pada pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan dalam dunia pendidikan dapat terjalin dengan baik, serta kesalahan komunikasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah dapat dihindari. Mengingat bahwa lulusan SMP belum bisa menjadi tumpuan bagi masyarakat ataupun pemerintah dalam membangun daerah, maka dari itu pada tingkat SMP dibutuhkan benar-benar bentuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang matang.

Sehingga dengan itu, memudahkan bagi mereka khususnya para siswa-siswa SMP bisa berfikir lebih matang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, sebagai usaha bersama dalam mendapatkan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang diharapkan.

¹¹ Soebagio Armodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Ardadizya Jaya, 2005), hlm. 76.

¹² Hamzah. B. Uno, *Metode Pembelajaran* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2007), hlm. 82.

C. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Tingkat SMP

1. Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP

Dalam membuat rancangan tentang pembangunan pendidikan disuatu kawasan. Diperlukan adanya tim yang solid yang benar-benar mampu diharapkan untuk mampu membuat formula yang jelas, bagaimana seharusnya rancangan yang jelas untuk mampu mendorong tujuan pendidikan tercapai dengan semestinya.

Pada tingkat lembaga atau institusi pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam SK Mendiknas Nomor 44 tahun 2020, mengenai peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kedua wadah diatas sebagai bentuk usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional ,melalui upaya-upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan.

Salah satu penunjang lancarnya program pembangunan bidang pendidikan adalah adanya fihak-fihak yang diberikan wewenang untuk mampu memberikan ragam inovasi dalam menciptakan langkah-langkah awal sebagai bentuk awal dimulainya penyusunan rencana pembangunan pendidikan dasar pada tingkat SMP.

Dalam ketentuan mengenai pembentukan Komite Sekolah (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), disebutkan bahwa peran dan fungsi kedua wadah diatas adalah adalah:

a. Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 4. Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- b. Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;

- e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.¹³

2. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di tingkat SMP

Dalam rancangan perencanaan pengembangan sekolah ditingkat SMP dibutuhkan setidaknya berbagai pertimbangan yang matang berupa hasil analisa atas keutuhan pokok untuk mampu selaras dengan rancangan pemerintah daerah dalam upaya membangun kondisi pendidikan yang berkualitas dengan kuantitas memuaskan.

Penyusunan RPS di tingkat lembaga pendidikan seperti SMP, melibatkan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pembahasan RPS. Keterlibatan masyarakat yang nota bene sebagai sasaran program pendidikan, dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan mampu mencapai rancangan yang sejalan dengan standar kemampuan masyarakat dan kondisi sekolah sendiri.

Dengan berpegang pada peran dan fungsi yang diatur oleh UU Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, diharapkan kedua

¹³ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

wadah ini mampu menjadi penghubung atau perantara antara masyarakat, pihak sekolah dan pemerintah.

Penyusunan RPS disebuah sekolah selain melibatkan Komite sekolah juga melibatkan pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, Guru-guru, dan perwakilan dari siswa. Dengan adanya hubungan semacam ini, setidaknya mampu melahirkan kesepahaman perihal permasalahan yang di alami di tiap-tiap institusi/lembaga pendidikan yang ada.

Dengan adanya hal semacam ini, setidaknya pada tingkat bawah dalam hal ini pihak yang terlibat dalam penyusunan RPS mampu melakukan berbagai analisis atas berbagai masalah yang ada. Dalam hal ini, analisis masalah dipahami sebagai hambatan dalam melakukan pembangunan pendidikan.

Analisis masalah merupakan proses identifikasi terhadap berbagai masalah yang terfokus pada suatu masalah inti (core problem). Dalam perencanaan pembangunan, analisis masalah merupakan teknik untuk meneliti keseluruhan masalah terkait dengan masalah inti atau yang menyebabkan terjadinya masalah inti sebagai rangkaian hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan hasil analisis masalah dituangkan dalam bentuk pohon masalah (problem tree).¹⁴

3. Implementasi Hasil RPS sebagai Bentuk Perencanaan Pembangunan Pendidikan Tingkat SMP

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan, pembangunan pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan perencanaan pembangunan daerah. Hubungan ini terletak pada bentuk atau model perencanaan yang dilakukan,

¹⁴ Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

selain itu bentuk pembangunan pendidikan merupakan salah satu program di berbagai daerah sebagai bentuk adanya desentralisasi yang ikut berimbas pada kreatifitas daerah dalam mengolah pendidikan di daerahnya masing-masing.

a. Bentuk vertikal dalam perencanaan pembangunan pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Adanya perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional memunculkan bentuk model perencanaan, berupa perencanaan horizontal dan vertikal.¹⁵ Hal ini bisa dipahami dengan melihat model perencanaan dalam skala nasional, wilayah, dan local. Model ini seutuhnya nampak dalam bentuk hubungan struktur pemerintahan di Indonesia dalam tingkatan tertentu. Sementara pada model vertical, merupakan bentuk perencanaan yang sifatnya sektoral. Bentuk ini dilakukan dengan model melakukan analisis dan menggabungkan berbagai aspek yang sesuai atau relevan (bergantung seutuhnya pada data yang ada/diperoleh) dalam tingkatan-tingkatan tertentu.

Lebih lanjut diutarakan dijelaskan oleh Staveren tentang perencanaan pembangunan bahwa, perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kondisi yang akan dicapai, perhitungan skala waktu yang diperlukan, perisetan dan inventarisasi, pelaksanaan, serta pengevaluasian.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa betapa hasil pengambilan data dan informasi, dan bentuk analisis hingga implementasinya sangat berkaitan.

¹⁵ Staveren dkk. 1980. *Framework for Regional Planning in Developing Countries*. Netherland : Internasional Institute for Land Reclamation and Improvement. Hlm 14

¹⁶ Staveren dkk. 1980. Hlm 23

Pola perencanaan yang memberikan perhatian pada sasaran pendidikan dalam hal ini adalah masyarakat, disebut oleh Staveren sebagai pola *bottom up*. Artinya bahwa bentuk perencanaan yang dilakukan mengandalkan hasil data atau kajian dari pihak tertentu pada tingkat bawah (misalnya pada satuan tingkat bawah dalam pendidikan) yang berhasil mengumpulkan data dan informasi terkait dengan beragam kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Sementara itu sebagai bentuk respon atas informasi yang ada dinamakan *top-down*. Antara dua bentuk perencanaan di atas *bottom up* dan *top down* merupakan hubungan timbal balik, sebagai proses usaha perencanaan pembangunan.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan sasaran utama dari berbagai program yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Oleh karena itu sebagian besar implementasi berbagai program Direktorat Pembinaan SMP adalah di sekolah (SMP). Tugas sekolah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota berkaitan dengan berbagai program dari Direktorat Pembinaan SMP Jakarta.
2. Melaksanakan program yang diperolehnya secara sungguh-sungguh, konsekuen, dan komitmen yang tinggi sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP Jakarta.

3. Melakukan konsultasi pelaksanaan program yang diperolehnya dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota.¹⁷

Peran Pemda dan Masyarakat dalam program pendidikan Keberhasilan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang bermutu tidak hanya merupakan tugas dan wewenang pemerintah pusat saja, tetapi juga merupakan kewajiban dan wewenang pemerintah daerah, sesuai dengan PP No. 47 tahun 2008 dan PP No. 48 Tahun 2008. Di kedua peraturan pemerintah itu telah diatur kewajiban dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat, sebagai berikut :

Tanggung Jawab Pemerintah dan pemerintah daerah

1. Menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
2. Invenstasi pada lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
3. Bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan.
4. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berkeunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga

¹⁷ Kebijakan Direktorat SMP 2009 Hlm 85

bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.

5. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pemerintah daerah mengendalikan biaya-biaya lain yang diminta oleh sekolah atau biaya personal yang memberatkan siswa, seperti seragam, LKS, sepatu dan lain-lain.
2. Pemerintah daerah wajib memantau besarnya biaya sekolah swasta yang dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik agar tidak terlalu memberatkan.
3. Biaya dari pemerintah dalam menyediakan biaya operasional sekolah hanya merupakan stimulan. Pemerintah daerah wajib menutupi kekurangan biaya lainnya sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan.

b. Desentralisasi Pendidikan

Terkait dengan berlakunya otonomi daerah (berdasar pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) berlaku sejak 1 Januari 2001, kewenangan pemerintah Pusat untuk urusan bidang pendidikan beralih ke pemerintahan Daerah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, kewajiban bagi pemerintah daerah (setelah otonomi daerah berlaku) untuk mengurus bidang pendidikan di samping bidang-bidang lain selain politik luar negeri, moneter, keamanan, dan fiskal, dan agama, serta kewenangan lain. Perihal

di atas berdasar pada UU No.32 tahun 2004 tentang UU pemerintah daerah pengganti UU No 22 tahun 1999. Selain itu terjadi perubahan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah seperti yang di atur dalam Pasal 78 UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 (telah diganti dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah), yang mengatur tentang desentralisasi kekuasaan juga diikuti oleh desentralisasi dalam pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD). Posri pembiayaan pusat terhadap APBD di atur dalam dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak(PBB, BPHTB dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun kewenangan dalam pembelanjaan keuangan daerah menjadi sepenuhnya milik daerah yang tertuang dalam dokumen APBD.¹⁸

Maka dari itu, baik pendidikan dasar maupun menengah di daerah bergantung sepenuhnya pada kinerja pemerintah daerah, berdasarkan pada rancangan pembangunan daerah. Pada pasal 167 UU No. 32 tahun 2004, di sebutkan: *"...pemerintah daerah diwajibkan melakukan peningkatan pelayanan dasar pendidikan, dengan ketentuan sekurang kurangnya 20%"*. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁸ Ibrahim Fahmy Badoh, kumpulan tulisan, Prospek Ekonomi Indonesia Berbasis Sektoral “, dalam Eko Setia Budi“Anggaran Kinerja dan Korupsi Anggaran”

Dalam hal alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dalam UU, bahwa seperlima dari APBD di alokasikan untuk pendidikan. Berdasarkan pada hasil evaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Pusat Daerah, Departemen Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Depkeu, 2004: 108), menjelaskan bahwa terjadi penurunan anggaran belanja untuk tingkat nasional pada bidang pendidikan sejak tahun 2001 hingga 2002. Dengan rasio pengeluaran pada sector pendidikan terhadap penurunan pembangunan turun dari 22,46% pada tahun 2001 menjadi 20,68% pada tahun 2002.

Desentralisasi sebagai usaha pemberian wewenang dari pusat ke daerah, ternyata tak mampu memberikan hasil yang baik selama ini. Sentralisasi justru tetap menjadi mode (kendati tak menjadi system), yang masih berlaku dalam hal alokasi anggaran pendidikan di daerah. Padahal keberuntungan untuk pemerintah daerah khususnya dalam mendobrak produktifitas dalam berbagai sektor di daerahnya telah terbuka setelah adanya otonomi daerah. Yang dengan itu, pemerintah setiap daerah sanggup melakukan pemanfaatan kondisi dan budaya serta potensi potensi alam yang dimilikinya, maka manajemen pendidikan akan beragam sesuai dengan tuntutan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di daerahnya.¹⁹ Demikian dijelaskan H.A.R. Tilaar, sehubungan otonomi daerah perihal pendidikan.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁹ H.A.R. Tilaar *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformasi untuk Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 486.

(Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004). Tentang desentralisasi ini ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.²⁰ (Soejito, 1990).
2. Pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjacli urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.²¹ (Koswara, 1996).
3. Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti merestrukturisasi atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional, maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Sehingga meningkatkan kualitas keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subnasional.²² (UNDP, 2004: 5).

²⁰ Soetijo. 1990. Hlm

²¹ Koswara, Ekom. 1996. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut UU No. 5 Tahun 1974*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hlm 44

²² UNDP. 2004. Hlm 5

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinnekaan, dalam arti bahwa pemberian kewenangan tersebut sebagai bukti akan kemajemukan sebuah kawasan khususnya dalam pembentukan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dikawasan tersebut. Menurut H.A.R Tilaar, bahwa pelaksanaan desentralisasi sistem pendidikan nasional berarti memberikan keleluasaan yang besar kepada pemerintah daerah dan hal ini sesuai pula dengan kebijakan nasional untuk melaksanakan otonomi daerah bahkan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.²³

Menurut Santoso S. Hamijoyo (1999: 3), ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; (3) peran serta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional.²⁴

Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.

²³ H.A.R Tilaar. 2002. Hlm 6-7

²⁴ Santoso.S Hamijoyo. 1999. Hlm 3

BAB III

KONDISI OBYEKTIF SMP DI KABUPATEN KLATEN

A. Keadaan Umum Pendidikan Masyarakat Kab Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dengan potensi sumber daya alam yang besar, akan tetapi tingkat pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak berimbang dengan sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut terkait dengan usaha pembangunan manusia di Klaten yang masih mengalami banyak kendala dari sisi sumber daya manusia.

Dalam mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten tahun 2005-2025 disebutkan, beberapa indikasi atau ukuran dalam tercapainya sasaran pokok. Salah satunya adalah, “meningkatkan kualitas sumber daya alam (SDM), yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)”¹.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan manusia sendiri. Dan diakui bahwa pendidikan adalah unsur yang paling penting dalam proyek pembangunan manusia. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Klaten 2009, pendidikan menempati posisi yang yang paling mendasar dalam usaha pemerintah Kab Klaten meningkatkan pembangunan manusia. Keberhasilan tersebut di tandai dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Terdapat dua indikator yang menjadi sandaran bagi pemerintah Klaten dalam mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk di Klaten. Sebagaimana

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 7 tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Klaten 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Klaten. Hlm IV-1

yang disebutkan dalam IPM Klaten 2009, antara lain adalah, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Serta selanjutnya mengukur tingkat kualitas pendidikan dengan mengacu pada 3 komponen antara lain adalah, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, dan angka melek huruf.²

Berdasarkan data dari IPM Klaten 2009, *Angka Partisipasi Sekolah* di Klaten ditampilkan berdasarkan umur yaitu kelompok usia 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24. Usia 7-12 diparalelkan sebagai partisipasi sekolah untuk SD/MI, usia 13-15 sebagai usia sekolah untuk SMP/MTs, usia 16-18 menunjukkan usia sekolah untuk SMA/SMK/MA, dan usia 19-24 menunjukkan partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi/akademi dengan berbagai jenjang.

Angka Melek Huruf, digambarkan sebagai presentase kemampuan suatu wilayah yang bisa membaca (huruf latin atau huruf lainnya). Indeks penduduk di Klaten pada 2009 mengalami penurunan, yaitu 76,74 di tahun 2008 menjadi 76,33. Kendati demikian, angka melek huruf mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 sebesar 89,28 naik menjadi 89,80 pada tahun 2009. Rata-rata lama sekolah sedikit mengalami penurunan dari 7,75 di tahun 2008 menjadi 7,38 pada tahun 2009. Artinya pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Klaten masih sama yaitu rata-rata pada kelas dua SMP.

Angka Putus Sekolah di Klaten pada 2009 meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 353 siswa menjadi 538 siswa. Setidaknya indikasi ini segera mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk segera mencari jalan keluar yang lebih maksimal.

² *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2009*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten. Klaten 2009. Hlm 40

Dari data diatas, bisa kita katakan bahwa, pemerintah Kab Klaten harus segera mengkhhususkan perhatian pada kasus putus sekolah yang didominasi pada level SMP. Kendati telah mencapai pendidikan usia 9 tahun akan tetapi sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di Klaten, pemerintah Kab Klaten harus melakukan reaksi yang berguna untuk mencapai hasil maksimal.

Pencapaian hasil akhir bagi siswa terdidik tingkat SMP diharapkan mampu melahirkan produk sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa dengan segera di berdayakan. Dengan perencanaan yang matang dan perhatian yang maksimal dari pemerintah di harapkan bagi mereka yang belum ingin masuk kemasyarakat dan yang punya kemampuan akademik serta kemampuan ekonomi, tamatan SMP diharapkan sudah punya kompetensi sebagai produk pendidikan dasar. Bila ia ingin melanjutkan seharusnya punya kesiapan melanjutkan, bila ia ingin bekerja diharapkan dapat jadi pekerja yang baik, dan bila ia ingin jadi orang tua diharapkan juga dapat jadi orang tua yang baik.

Berikut Indikator Pendidikan Kabupaten Klaten tahun 2007-2009:

No	Indikator	2007	2008	2009
	1	2	3	4
1	Penduduk Usia 7-12 tahun:			
	Tidak/Belum pernah sekolah (%)	0,4	0,0	0,0
	Masih Sekolah (%)	99,3	99,3	99,5
	Tidak Sekolah lagi(%)	0,3	0,7	0,5
2	Penduduk Usia 13-15 tahun:			
	Tidak/Belum pernah sekolah (%)	0,6	0,0	0,4
	Masih Sekolah (%)	96,3	96,0	91,8
	Tidak Sekolah lagi (%)	3,1	4,0	7,8
3	Penduduk Usia 16-18 tahun:			
	Tidak/Belum pernah sekolah (%)	1,2	0,8	0,4

	Masih Sekolah (%)	71,3	70,8	91,8
	Tidak Sekolah lagi (%)	27,5	28,4	7,8
4	Penduduk Usia 19-24 tahun:			
	Tidak/Belum pernah sekolah (%)	0,4	0,0	0,3
	Masih Sekolah (%)	12,5	11,5	14,5
	Tidak Sekolah lagi (%)	87,1	88,5	85,2

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2009

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten 2010, Pendidikan menempati posisi penting sebagai Urusan Wajib. Dijelaskan dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2010 bahwa pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kualitas pendidikan, dan terjadinya sinergi antara pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat dalam arangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan , pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan cagar budaya, serta pengembangan dan pembinaan atlet berbakat, pengembangan budaya prestasi.³

Selain itu berdasarkan pada laporan dalam RKPD Kabupaten Klaten 2011, bahwa dalam permasalahan pembangunan nasional dan prioritasnya serta identifikasi/evaluasi terhadap kondisi yang ada di kabupaten Klaten, ditetapkan

³ Berita Daerah Kabupaten Klaten 2011. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten. Pemerintahan Kabupaten Klaten. Hlm 39

dalam poin pertama tentang belum meratanya kualitas pendidikan dan kuantitas WAJAR (Wajib Belajar) 9 tahun serta keberlanjutan sampai WAJAR 12 tahun.⁴

Berikut data demografi tentang kondisi masyarakat nonpendidikan di Kabupaten Klaten yang diperoleh dari Profil Pendidikan Kab Klaten 2010/2011⁵:

Demografi		Jumlah
a.	Jumlah Penduduk Seluruhnya	1.303.910
b.	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	132.211
c.	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	76.593
d.	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	83.137
e.	Kepadatan Penduduk	1.989
f.	Tingkat Pendidikan Penduduk	10.000
	- Tidak/belum pernah sekolah	1.244
	- Tidak/belum tamat SD	1.346
	- Tamat SD	2.933
	- Tamat SMP	1.830
	- Tamat SMA	973
	- Tamat SMK	994
	- Tamat Diploma I/II	117
	- Tamat Diploma III/Sarmud	169
	- Tamat Sarjana	394
	- Tamat Terjawab	

⁴ Berita Daerah Kabupaten Klaten. 2011 RPKD Kab Klaten 2011 Hlm 53

⁵ Keadaan Umum Non Pendidikan Kab. Klaten 2010. *Profil Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2010*. Pemerintah kabupaten Klaten Dinas Pendidikan.

g.	Tingkat Kepandaian Membaca/Menulis	1./294.787
	- Dapat membaca dan menulis	1.180.952
	- Buta huruf	113.835

Sumber Profil Pendidikan Kabupaten Klaten 2010/2011

B. Keadaan Dunia Pendidikan Dasar Tingkat SMP di Kabupaten Klaten

Berdasarkan data yang ada jumlah SMP sebanyak 132, dengan siswa baru tingkat I sebanyak 17.516 siswa seluruhnya sebanyak 51.514 dan lulusan sebanyak 15.535. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 1.440, rincian 1.243 memiliki kondisi baik, 179 dengan kondisi rusak ringan dan yang rusak berat 18. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 1.482 sehingga terdapat shift sebesar 0,91.

Pada tingkat (SMP) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klaten, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan untuk periode 2010/2011 bahwa kondisi proses pendidikan SMP pada tingkat angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan sekolah, ternyata presentase mengulang pada SMP masih tinggi dengan 0,15 hal ini jika dibandingkan dengan pendidikan sederajatnya yaitu MTs, yang hanya 0,08. Namun pada angka lulus kelulusan SMP mencapai 87,84 lebih besar beberapa poin dibandingkan MTs, tentunya hal ini berdasarkan bentuk presentase jumlah siswa atau peserta belajar dimana masih didominasi oleh SMP dalam banyaknya jumlah siswa.

Kemajuan pendidikan Kabupaten Klaten bisa dikatakan cukup baik. Dengan dilaksanakannya program pemangunan pendidikan di daerah Klaten telah

menyebabkan makin berkembangnya sarana dan prasarana belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan, terkhusus SMP

Berikut data pokok SMP dan MTs Kabupaten Klaten Tahun 2009/2010

No.	Komponen	SMP	MTs	SMP + MTs
1.	Sekolah	107	25	132
	a. Negeri	65	16	81
	b. Swasta	42	9	51
2.	Siswa Baru Tk.I	15.428	2.088	17.516
	a. Laki-laki	7.879	1.096	8.975
	b. Perempuan	7.549	992	8.541
3.	Siswa	45.467	6.047	51.514
	a. Laki-laki	23.170	3.166	26.336
	b. Perempuan	22.297	2.881	25.178
4.	Lulusan	14.250	1.285	15.535
5.	Ruang Kelas (Milik)	1.248	192	1.440
	a. Baik	1.085	158	1.243
	b. Rusak Ringan	147	32	179
	c. Rusak Berat	16	2	18
6.	Ruang Kelas Bukan Milik			
7.	Kelas	1.324	158	1.482
8.	Guru	3.250	599	3.849
	a. Layak Mengajar	2.788	505	3.293
	b. Tidak Layak Mengajar	462	94	556
9.	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	73	17	90
	b. Lapangan Olahraga	11	1	12
	c. UKS	71	14	85
	d. Laboratorium	85	11	96
	e. Tempat Ibadah	76	18	94

f. Air Bersih	107	25	132
g. Toilet	878	150	1.028
h. Listrik	107	25	132

Sumber Profil Pendidikan Kabupaten Klaten 2010/2011

Adapun kondisi siswa SMP di Kabupaten Klaten tercatat bahwa pada periode 2010/2011 saat ini tercatat jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 76 siswa. Hal ini dikarenakan oleh hambatan ekonomi. Persoalan ini cukup menjadi masalah yang harus dihadapi para orang tua siswa untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Adapun jumlah siswa SMP yang mengulang sebanyak 73 siswa.

Menjadikan pendidikan dasar sebagai suatu kebijakan sosial, secara otomatis pendidikan dasar sepenuhnya bergantung pada persoalan ekonomi dan persoalan politik di sebuah daerah. Keseimbangan ekonomi dan situasi (politik) sosiologis di daerah memberikan pengaruh yang cukup besar, mengingat kedua hal itulah yang menjadi penggerak utama proses pendidikan. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU Sisdiknas.

Dalam dokumen tentang profil Pendidikan Kabupaten Klaten bahwa kinerja bidang pendidikan dasar dan menengah (secara otomatis tingkat SMP ikut juga didalamnya) , terdapat 3 sasaran pokok kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan ini mengacu pada beberapa indikator antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Pendidikan, dan presentase Angka Melanjutkan.

Dalam pemerataan pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Klaten, berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Profil Pendidikan Klaten, yaitu:

Indikator Pemerataan SLTP dan MTs tahun 2010/2011

No.	Indikator	SLTP (%)	MTs(%)
1.	APK	95,36	14,44
	Laki-laki	93,23	
	Perempuan	97,23	
	Kota	95,36	
	Desa	-	
2.	APM	68,24	
	Laki-laki	67,68	
	Perempuan	68,85	
3.	Rasio		
	Siswa/Sekolah	425	242
	Siswa/Kelas	34	38
	Siswa/Guru	14	10
	Kelas/R.Kelas	1,06	0,82
	Kelas/Guru	0,40	0,26
4.	Angka Melanjutkan	89,06	1,81
5.	Kepadatan Penduduk	84,07	84,07

Sumber Profil Pendidikan Kabupaten Klaten

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Dalam meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan, terdapat beberapa indikator antara lain , adalah: mutu masukan, mutu proses, mutu sumber daya manusia, mutu fasilitas dan biaya.

Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP tahun 2010/2011

Indikator	SMP	MTs	SMP+MTs
Angka Masukan Kasar (AMK)	87,39	3,08	107,04
Angka Mengulang	0,15	0,08	0,15
Angka Putus Sekolah	0,16	0,20	0,6

	Angka Lulusan	87,84	72,35	86,32
	Angka Kelayakan Mengajar	85,78	84,31	85,55
	a. Layak	14,22	15,69	14,45
	b. Tidak Layak			
	Presentase Guru Bersertifikasi			
	a. Sudah			
	b. Belum			
	Jumlah Kesesuaian Guru Mengajar			
	a. PPKN	5,85	-	5,85
	b. Pendidikan Agama	8,09	-	8,09
	c. Bhs. Indonesia	11,88	-	11,88
	d. Bhs. Inggris	11,74	-	11,74
	e. Sejarah & Sejarah Budaya	-	-	-
	f. Pendidikan Jasmani	5,87	-	5,87
	g. Matematika	12,29	-	12,29
	h. IPA	132,02	-	132,02
	i. IPS	9,72	-	9,72
	j. Seni & Kerajinan	1,83	-	1,83
	k. Muatan Lokal	5,14	-	5,14
	l. B dan P	6,97	-	6,97
	m. Lain-lain	-	-	-
	Presentasi Kondisi Ruang Kelas			
	a. Baik	86,94	82,29	86,32
	b. Rusak Ringan	11,78	16,67	12,43
	c. Rusak Berat	1,28	1,04	1,25
	Presentase Fasilitas Sekolah	68,22	68,00	68,18
	a. Perpustakaan	10,28	4,00	9,09
	b. Lapangan OR	66,36	56,00	64,39
	c. UKS	39,72	44,00	36,36
	d. Laboratorium			
	Angka Partisipasi			
	a. Pemerintah Pusat	16,61	17,62	16,71
	b. Yayasan	0,98	0,16	0,89
	c. Orang Tua	10,23	2,09	9,36
	d. Pemda	70,06	33,74	66,18
	e. Lainnya.	2,12	46,77	6,05
	Satuan Biaya	3.218.599.	1.907.3	3.180.798.
		415	35	381

Sumber Profil Pendidikan Kabupaten Klaten

3. Efisiensi Internal Pendidikan

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Klaten mengacu pada: jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan per input dan rasio keluaran dan masukan.

Efisiensi Internal Pendidikan SLTP dan MTs
Tahun 2010/2011

No.	Komponen	SLTP	MTs
1.	Jumlah Keluaran	996	993
2.	Jumlah Tahun Siswa	2.999	3,001
3.	Jumlah Putus Sekolah	4	7
4.	Jumlah Mengulang	4	9
5.	Lama Belajar (tahun)		
	Lulusan	3,00	3,01
	Putus Sekolah	1,87	1,94
	Kohort	3,00	3,00
6.	Tahun-siswa terbuang		
	Jumlah Siswa	13	27
	Mengulang	6	14
	Putus Sekolah	7	14
7.	Tahun masukan perkuliah	3,02	3,02
8.	Rasio keluaran/masukan	0,99	0,99
9.	Angka bertahan (%)	99,85	99,74
10.	Koefisien Efisiensi (%)	99,63	99,05

Sumber Profil Pendidikan Kabupaten Klaten

Dengan indikator yang disebutkan diatas maka dapat dilihat bahwa pada tingkat SMP di Kabupaten Klaten, secara perlahan mengalami perkembangan.

Namun kendati demikian, dinas pendidikan kabupaten Klaten tetap diharapkan mampu memberikan atau menjadi inspirasi lahirnya inovasi-inovasi terkait dengan pembangunan pendidikan. Selain itu juga, pihak sekolah, masyarakat dan siswa sendiri adalah yang harus lebih bersemangat dalam

melahirkan proses pembangunan yang berkualitas kelak, dengan tetap melakukan hubungan intensif dengan tingkat atas dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten.

Dari sekian banyak jumlah SMP yang ada di Kabupaten Klaten, berikut penulis sampaikan data yang berhubungan dengan jumlah anggaran yang diterima SMP perkecamatan, serta sumber dananya..

No./Kecamatan		Dana Menurut Sumber (Ribuan Rupiah)						Jumlah
		P. Pusat	Yayasan	Orang Tua	Pemprov	Pemkab/Kota	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prambanan	709.080.000	0	558.730.000		2.353.374.985	30.452.000	3.651.636.985
2.	Gantiwarno	1.092.120.000	255.074.400	564.973.000		4.728.006.198	86.323.000	6.726.496.598
3.	Wedi	1.169.877.000	272.758.000	873.833.670		3.706.181.000	59.641.785	6.082.291.455
4.	Bayat	997.080.000	0	772.278.000		4.586.599.400	329.536.141	6.685.493.541
5.	Cawas	1.164.614.000	11.200.000	981.708.500		5.742.678.000	142.752.708	8.042.953.606
6.	Trucuk	1.002.780.000	0	626.790.000		4.366.860.674	82.455.630	6.078.886.304
7.	Kalikotes	382.470.000	0	279.472.000		2.070.308.000	7.198.000	2.739.448.000
8.	Kebonarum	410.400.000	0	331.600.000		1.881.490.000	23.542.500	2.647.032.500
9.	Jogonalan	907.640.000	0	337.160.000		3.111.262.647	73.284.000	4.429.356.727
10.	Manisrenggo	1.094.992.000	0	182.760.000		3.196.163.000	79.454.864	4.553.370.364
11.	Karangnongko	567.720.000	0	453.078.500		2.913.479.000	56.563.622	3.990.841.122
12.	Ngawen	471.960.000	0	153.180.000		2.049.275.233	108.809.763	2.783.224.996
13.	Ceper	904.340.000	0	446.000.000		4.655.975.000	352.861.500	6.359.176.500
14.	Pedan	1.213.510.000	0	802.960.000		4.460.125.200	76.666.112	6.553.261.551

15. Karangdowo	1.095.607.500	0	713.350.000		5.604.164.600	205.682.735	7.618.804.835
16. Juwiring	878.190.000	0	702.843.800		3.922.538.615	121.879.815	5.625.452.230
17. Wonosari	976.019.372	0	477.200.000		4.208.609.000	164.120.000	5.825.948.372
18. Delanggu	1.411.888.000	0	1.389.513.000		6.316.837.000	100.408.101	9.218.646.101
19. Polanharjo	855.976.000	0	266.500.000		2.740.319.000	32.280.000	3.886.075.000
20. Karanganom	1.378.090.000	0	775.461.740		6.392.092.000	151.743.020	8.697.386.760
21. Tulung	924.485.000	0	410.615.000		3.353.724.000	44.825.068	4.733.649.068
22. Jatinom	1.070.515.000	0	707.488.877		5.588.520.400	269.698.178	7.636.222.455
23. Kemalang	674.164.000	4.800.000	298.240.000		3.313.259.000	113.331.121	4.403.794.271
24. Klaten Selatan	396.720.000	0	367.514.960		1.643.156.000	57.360.000	2.464.750.960
25. Klaten Tengah	874.507.000	364.226.556	383.295.000		2.660.270.022	322.537.586	4.604.837.104
26. Klaten Utara	1.677.430.000	519.866.000	1.115.663.000		6.964.962.700	23.110.000	10.301.032.200
	24.302.177.179	1.427.925.456	14.972.209.047		102.530.230.674	3.107.517.249	146.340.059.605

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Klaten 2010



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR TINGKAT

SMP DI KABUPATEN KLATEN

A. Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten

Dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan dasar khusus SMP di Klaten menggunakan metode *bottom up planning*. Model ini merupakan model penyusunan yang dimulai dari bawah hingga ke tingkat atas dalam satuan pendidikan. Metode ini selain mampu mendekatkan pengelola pendidikan dengan pihak masyarakat sebagai sasaran diadakannya pengelolaan pendidikan, juga memudahkan komunikasi dari tingkat sekolah sendiri dengan dinas pendidikan yang memang bertanggung jawab dalam urusan pendidikan di tingkat kabupaten.

Dalam hal ini pada tingkat bawah tercipta kerjasama beberapa, dimana pihak Komite Sekolah melakukan penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah) dengan Dewan Guru, Kepala Sekolah, siswa (perwakilan). Selanjutnya dilakukan verifikasi atas penyusunan RPS dari tingkat sekolah oleh dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang melibatkan beberapa unsur antara lain adalah Kasi SMP, Ka. Subag Perencana, Kabid Diknas, dan Sekretaris.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Lies, tentang penyusunan RENSTRA :

“Dalam penyusunan RENSTRA, setelah mengambil data (awal) yang diperoleh dari lapangan (sekolah SMP) selanjutnya diolah oleh tim dari Dinas, dan kemudian dibuat dalam bentuk draft. Dalam penyusunannya metode yang kami gunakan adalah lewat sampling data dan wawancara.”¹

Penyusunan RENSTRA di maksudkan untuk berbagai potensi-potensi yang memungkinkan berjalannya pembangunan pendidikan, yang berdasarkan pada apa yang diperoleh pada tingkat bawah satuan pendidikan, serta dengan itu mampu melahirkan pembacaan atau hasil analisis dalam mencapai visi dan misi pendidikan, yang tentunya telah memiliki indikasi-indikasi yang jelas adanya.

Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas

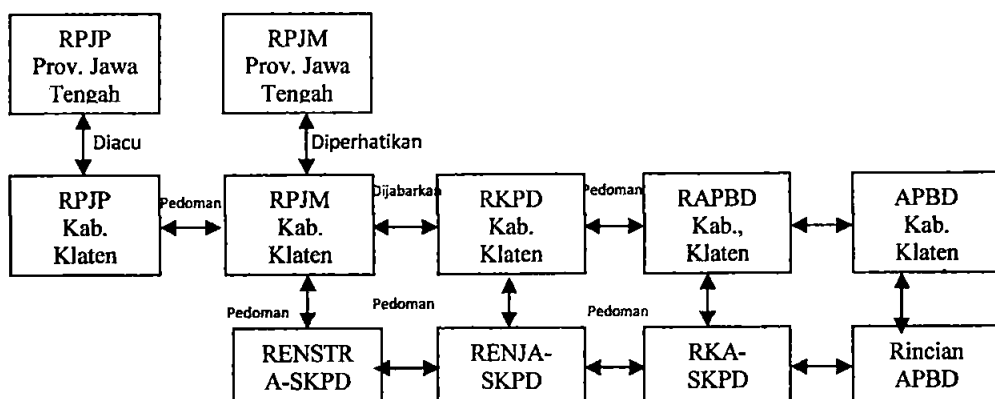
¹Wawancara dilakukan dengan Ibu Liestyowati, SM,SE,M.Si selaku KASUBAG Perencanaan dan Program Pendidikan Kab Klaten, pada tanggal 2 Mei 2011 Pukul 09.55WIB

pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita.

Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah telah diatur mengenai kewajiban SKPD dalam penyusunan Renstra dengan berpedoman pada RPJMD.

Tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional di tingkat Daerah yang diatur dalam UU nomor 25 tahun 2004 disebutkan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian RPJMD dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah itu Dinas Pendidikan Klaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjabarkan RPJMD Klaten ke dalam Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Pendidikan Kabupaten Klaten.

Berikut Skema Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Klaten yang diperoleh dari RKPD Kabupaten Klaten 2011.



Pada RPJMD Kabupaten Klaten berakhir pada 2010, sementara RPJMD 2011-2015 belum tersedia, maka RKPD disusun berdasarkan RPJMD 2006-2010 dan RPJP Daerah Kabupaten Klaten tahun ke dua serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.²

a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

“Terwujudnya masyarakat Klaten yang cerdas, produktif berbudaya dan berakhlak mulia”

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
2. Meberdayakan tenaga pendidikan ke pendidikan
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan ke pendidikan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasaranan pendidikan
5. Meningkatkan minat untuk mencintai kebudayaan daerah

Proses perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan pada pendekatan politik, partisipatif, teknokratik, *bottom up* dan *top-down*.

² RKPD Kabupaten Klaten 2011. Pemerintah Kabupaten Klaten

Bentuk pendekatan semacam untuk bertujuan untuk mencapai pemerataan dalam proses pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Karena jika tidak, justru akan melahirkan permasalahan baru, yang berujung pada ketidaksinergian pada berbagai lini di daerah.

Pencapaian hasil yang maksimal bergantung seutuhnya pada hasil pendataan yang dilakukan dari bawah. Yang dengan itu memudahkan Dinas Pendidikan untuk selanjutnya memberikan respon positif untuk memberikan ragam inovasi yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan di Kabupaten Klaten khususnya pada tingkat SMP.

Sebagaimana dalam visi dan misi direktorat SMP tahun 2009:

a. Visi Direktorat Pembinaan SMP:

Visi Direktorat Pembinaan SMP adalah 'Tercapainya layanan Pendidikan SMP yang Bermutu dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun'.

b. Misi Direktorat Pembinaan SMP:

Misi Direktorat Pembinaan SMP adalah 'penyelenggaraan SMP yang memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada anak usia SMP untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'.³

B. Mekanisme Perencanaan Pendidikan Dasar khusus SMP di Kabupaten Klaten

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

³ Kebijakan Direktorat Pembinaan SMP 2009 Hlm 2

Dalam mencapai tujuan yang dimaksud sebagai bentuk perlunya perencanaan pendidikan dasar diperlukan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di tingkat SMP yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pada tingkat sekolah-sekolah SMP yang ada.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KASUBAG Perencanaan dan Program Pendidikan Kab Klaten Ibu Liestyowati, SM,SE,M.Si:

*“Dalam penyusunan RPS diperlukan adanya beberapa fihak yang berhak untuk ikut andil dalam penyusunan RPS. Antara lain adalah Dewan Guru, Komite Sekolah, Siswa dan Kepala Sekolah. Hal ini mengacu pada aturan yang terdapat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS”.*⁴



Laporan RPS sekolah yang berhasil disusun oleh fihak yang disebutkan diatas berisi tentang hasil analisi atas berbagai persoalan yang ada di tingkat SMP, selanjutnya melakukan analisis masalah serta jalan keluar yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah yang berhasil ditemukan.

Peran Komite Sekolah disini sangat penting, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang tugas dan peran Komite Sekolah, yaitu sebagai pemberi masukan (advisor agency).

⁴ Wawancara dilakukan dengan Ibu Liestyowati, SM,SE,M.Si selaku KASUBAG Perencanaan dan Program Pendidikan Kab Klaten, pada tanggal 2 Mei 2011 Pukul 10.11WIB

Secara normatif, tujuan pendirian Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wadah dan penyalur aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional dan program
2. Untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka salah satu fungsi penting komite sekolah adalah mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pemerataan pendidikan di daerahnya.

Keanggotaan komite sekolah terdiri dari sebelah unsur yaitu orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan pendidikan, dunia usaha atau industri, lembaga sumber daya manusia bergerak di bidang pendidikan, alumni dan peserta didik, dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan dan perwakilan dari badan pertimbangan desa.

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah semata tetapi juga masyarakat maupun dunia usaha. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 47 bahwasanya sumber pendanaan pendidikan itu berasal dari Pemerintah (APBN),

Pemerintah Daerah (APBD) dan masyarakat (masyarakat, individu, dunia usaha). Sehingga persepsi yang selama ini menyalahkan pemerintah terhadap rendahnya atau kurangnya prestasi pendidikan Indonesia tidak sepenuhnya benar, karena pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata tetapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Untuk itu, guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah, hendaknya semua unsur yang ada di daerah saling bahu-membahu guna memajukan pendidikan. Dinas pendidikan sebagai *leading sector* hendaknya mampu bekerjasama dengan semua *stakeholder* di daerah yang *concern* terhadap dunia pendidikan. Dengan mengandeng para pengusaha tentu saja akan memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah dalam hal pembiayaan pendidikan yang semakin hari semakin mahal saja.

Pada satuan pendidikan SMP kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Keputusan akademik pada satuan pendidikan ditetapkan oleh rapat dewan pendidik. Rapat dewan pendidik dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada mutu, dan apabila keputusan dengan prinsip musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak. Pada jenjang pendidikan SMP melibatkan Komite Sekolah. Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari anggota masyarakat yang mewakili orang tua/wali peserta didik, tokoh

masyarakat, praktisi pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman atau aturan yang sekurang-kurangnya mengatur tentang: Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; Kalender kegiatan pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Struktur organisasi satuan pendidikan; Pembagian tugas di antara pendidik; Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; Peraturan akademik; Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

Sehubungan dengan perencanaan pengembangan sekolah, dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Karsidi selaku kepala sekolah SMP :

“Perencanaan dilihat sebagai suatu proses penentuan dan penyusunan rencana dan program-program kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang secara terpadu dan sistematis, yang mengacu pada landasan ,prinsip-prinsip dasar dan data atau informasi yang terkait serta menggunakan sumber-sumber daya

lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya”⁵

Penjelasan diatas merujuk pada tujuan dibuatnya RPS di tingkat SMP sebagai perwujudan keseriusan tingkat sekolah-sekolah dalam melakukan pengembangan tingkat satuan sekolah. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan pemerintah mampu memahami keperluan yang menunjang perkembangan pendidikan ditingkat satuan sekolah khususnya SMP. Serta dengan itu, keterpaduan antara program sekolah dengan ketersediaan sarana bisa tercapai.

“Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar , demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah di sesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang”.⁶

Terkait dengan masalah yang ada di tingkat satuan SMP, salah satu sekolah di Klaten yang menjadi contoh kasus dalam melakukan analisis masalah adalah SMP 2 Polanharjo.

Disekolah ini, ditemukan masalah mengenai kurangnya fasilitas yang memadai yang mendukung keterampilan dan dunia karya bagi para siswa. Padahal, program kegiatan, sejenis ekstrakurikuler juga

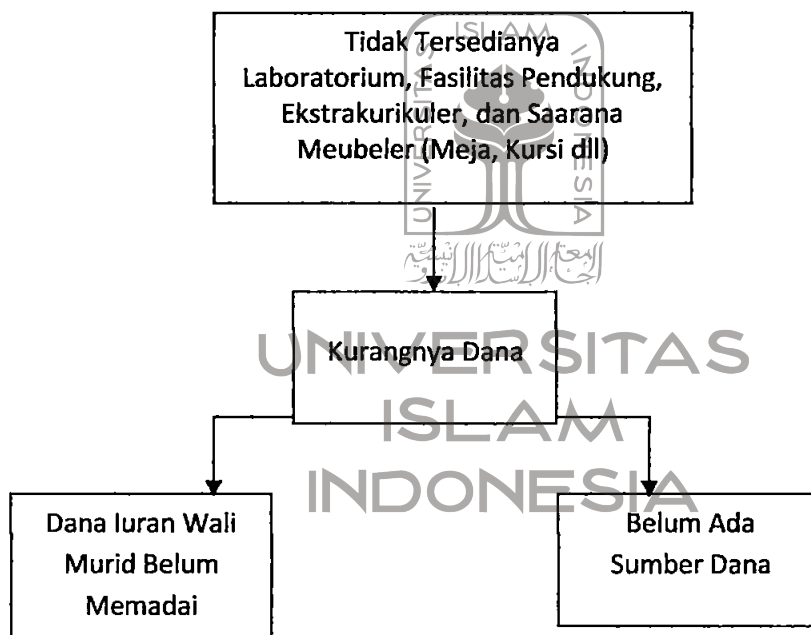
⁵ Wawancara dengan Bapak Karsidi Kepala Sekolah SMPN 2 Polanharjo Klaten, pada tanggal 6 Mei 2011, pukul 8.30 wib

⁶ Wawancara dengan Bapak Karsidi pukul 09.30 wib.

sangat dibutuhkan. Ini bertujuan untuk menggiatkan siswa dalam menemukan potensi dalam diri mereka. Sehingga kelak bisa berkarya dan berfikir mandiri.

Selain itu, dalam analisis masalah di SMP Polanharjo 2, terdapat masalah yang berhubungan dengan kelengkapan fasilitas belajar mengajar. Antara lain adalah ruang praktek atau ruang laboratorium.

Berikut gambar Grafik Anlisis Masalah SMP 2 Polanharjo :



Setelah melakukan analisis masalah dan membahas tentang prioritas masalah oleh Sekolah dan Komite Sekolah, selanjutnya dilakukan pemahasan tentang pemecahan masalah. Setelah itu, hasilnya dituangkan dalam bentuk Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS), kemudian diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk diverifikasi.

Dalam penyusunan RPS harus diperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya komunikasi yang lebih terbuka diantara warga sekolah.
2. Secara umum warga sekolah mempunyai lebih banyak tanggungjawab dalam pengambilan keputusan.
3. Lebih memperhatikan kebutuhan guru terutama dalam peningkatan motivasi kerja.
4. Memperhatikan kebutuhan siswa.
5. Sekolah mempunyai peran yang penting dalam masyarakat.

Hal diatas sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Atau dengan adanya hal semacam ini, pembahasan tentang prioritas perencanaan di tingkat satuan pendidikan SMP bisa terlaksana dengan baik diharapkan mencapai hasil yang maksimal.

Adapun tujuan adanya pedoman penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) ini antara lain adalah:

1. Untuk memberikan pedoman bagi semua jenis kelompok sekolah, yaitu sekolah rintisan, potensial, dan nasional dalam membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
2. Untuk memberikan pedoman bagi semua Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam membuat Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK).

3. Untuk memberikan pedoman bagi semua Dinas Pendidikan Propinsi dalam membuat Rencana Pengembangan Pendidikan Propinsi (RPPP).
4. Untuk memberikan pedoman bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam membuat Rencana Pengembangan Pendidikan Nasional (RPPN).
5. Untuk memberikan pedoman bagi semua sekolah dalam mencapai SNP, sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
6. Untuk memberikan pedoman bagi semua *stakeholder* di daerah/pusat dalam partisipasinya kepada sekolah untuk mencapai SNP.
7. RPS digunakan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pembimbingan kepada sekolah.

Penyusunan RPS ini pada dasarnya juga bertujuan untuk menciptakan ruang kerjasama antara tiap-tiap perwakilan dalam menjalankan program yang ada disekolah.

2. Verifikasi Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah yang dihasilkan dari kajian beberapa pihak yang disebutkan diatas akan menghasilkan laporan RPS. Dalam laporan ini selanjutnya akan ditinjau kembali oleh pihak Dinas Pendidikan sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil laporan RPS. Menurut Ibu Lies dari hasil wawancara penulis:

“ Setelah menerima hasil laporan RPS dari sekolah, selanjutnya pihak Dinas Pendidikan akan mengelompokkan hasil laporan tersebut. Usulan yang tercatat dalam laporan tersebut akan ditampung selama masih relevan dengan tujuan pembangunan pendidikan pemerintah Klaten, dan sebaliknya akan diabaikan jika terdapat usulan yang tidak relevan.”⁷

Dalam meninjau kembali hasil laporan RPS, Dinas Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki acuan-acuan tertentu. Acuan yang digunakan tersebut adalah SPM sebagaimana yang berlaku di Dinas Pendidikan. Lebih lanjut diutarakan kembali oleh Ibu Lies :

“jadi dalam meninjau kembali hasil laporan RPS dari sekolah, kami dari Dinas Pendidikan Pendidikan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku di Dinas Pendidikan Klaten selama ini”⁸

Jadi dalam melakukan verifikasi hasil laporan dari pihak sekolah Dinas Pendidikan Klaten tetap memiliki acuan yang jelas. Hal tersebut dilakukan, untuk menghindari hal-hal berupa program-program yang tidak seharusnya dilakukan atau dianggap tidak penting dan tidak relevan dengan tujuan pendidikan di kabupaten Klaten.

Adapun dalam tugas verifikasi tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain Kasi SMP, Ka. Subag Perencana, Kabid Diknas, dan Sekretaris. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Lies :

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lies. Tanggal 2 Mei 2011, pada pukul 10.35

⁸ Ibid

“...dalam tugas verifikasi di tingkat Dinas Pendidikan, terdapat beberapa pihak yang bertugas dalam menangani hal itu, antara lain adalah Kasi SMP, Ka. Subag Perencana, Kabid Dinas, dan Sekretaris. Beliau-beliau memang bertugas selama ini dalam melakukan verifikasi atas hasil laporan data data sekolah “⁹

Satuan petugas yang melakukan verifikasi, sebagaimana yang disinyalkan dalam penjelasan sebelumnya oleh Ibu Lies, beliau menjelaskan tugas petugas yang melakukan verifikasi :

“ jadi satuan petugas yang melakukan verifikasi atas RPS yang diusulkan oleh sekolah (SD, SMP, dan SMA) melewati 2 tahapan. Pertama, melakukan analisis tentang sejauh mana RPS tersebut sejalan dengan Rencana Strategi Pendidikan, kedua kesesuaian antara laporan penyusunan RPS dengan data yang sebenarnya ada di lapangan”¹⁰

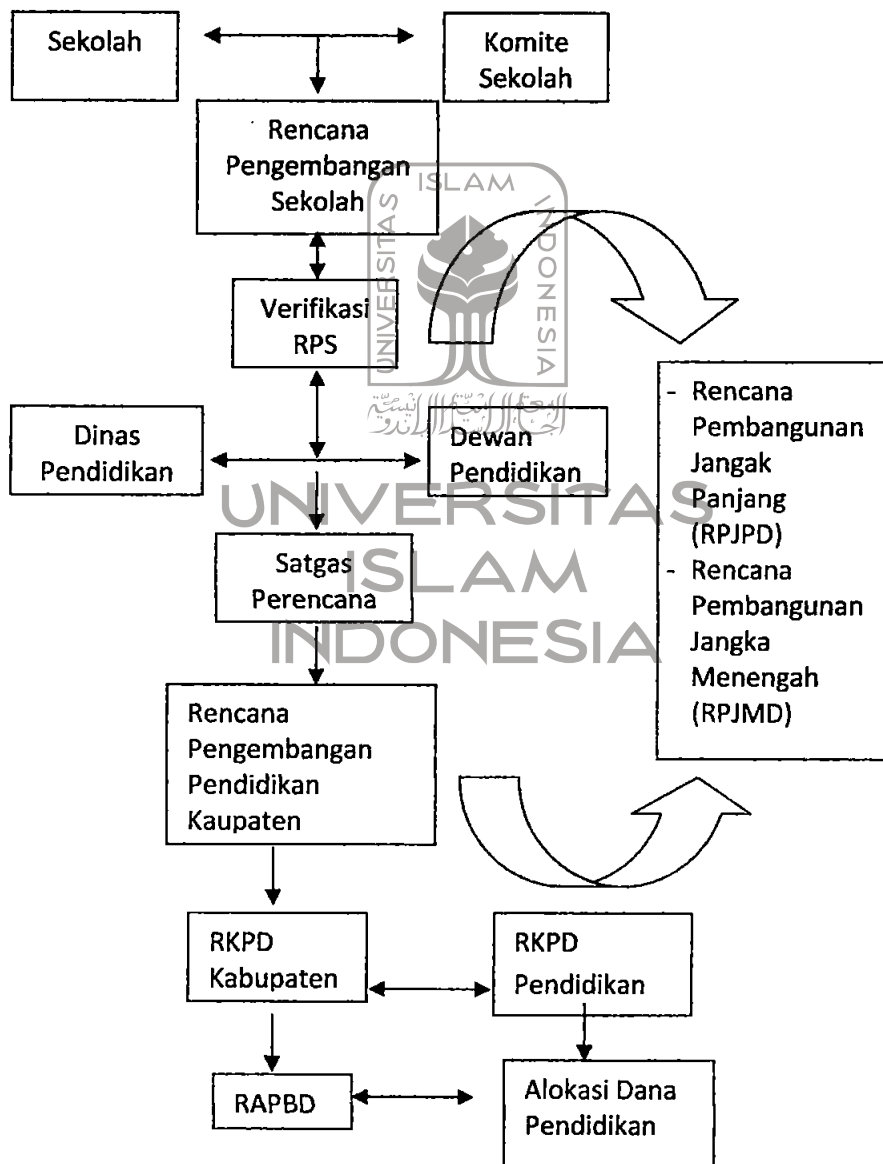
Faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sekolah yang baik akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya. Sedangkan perencanaan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap implementasinya. Oleh karena itu dalam setiap membuat RPS, sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lies. Tanggal 2 Mei 2011, pada pukul 10.20 wib

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lies, tanggal 3 Mei 2011, pada pukul 09.25 wib

mempengaruhi seperti kondisi lingkungan strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan masa datang.

Untuk lebih mudahnya berikut skema mekanisme Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar tingkat SMP di Kabupaten Klaten :



Berdasarkan pada hasil laporan dalam bentuk RPS setelah diverifikasi kembali oleh Dewan Pendidikan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten selanjutnya dijelaskan dan dituangkan kedalam Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPPK).

Dalam hal ini tugas Dewan Pendidikan sebagai pemberi masukan (*advisory agent*) mengacu pada aturan yang dalam UU Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, selain itu dalam petunjuk teknis pemberdayaan Komite Sekolah Dewan Pendidikan Kabupaten juga sebagai pelaksana program kegiatan pemberdayaan di daerah kabupaten/kotanya masing-masing, dengan alasan karena Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berada pada garis depan (*front line*) Komite Sekolah.¹¹

Dari hasil wawancara kami dengan perwakilan Sekretaris Dewan Pendidikan

“Selaku dewan Pendidikan kami hanya memberikan masukan pada Dinas Pendidikan dengan bersandar pada hasil laporan yang merupakan aspirasi di tingkat sekolah yang mencakup Komite sekolah”¹²

Adapun pedoman yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi antara lain mengacu pada : PP, Keputusan Menteri Pendidikan, Keputusan Ka. Dinas Pendidikan Provinsi, dan peraturan lain yang berlaku.

¹¹ Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007 – 2009. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Jakarta, 2007. Hal. 10

¹² Wawancara dengan Sekretaris Dewan Pendidikan . Tanggal 4 Mei 2011 Pukul 10.22

“ dalam hal pedoman dalam melakukan verifikasi, kita mengacu pada PP, Keputusan Menteri Pendidikan, Keputusan Ka. Dinas Pendidikan Provinsi, dan aturan-aturan lain yang berlaku..”¹³

Dengan adanya hubungan semacam ini diharapkan aspirasi ditingkat bawah bisa sampai ke dinas Pendidikan Klaten untuk mendapatkan respon yang lebih maksimal sebagai hubungan timbal balik dalam kerja sama mencapai tujuan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten.

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Pendidikan

Sebagai prioritas utama, maka pendidikan dalam pengelolaannya mendapatkan perhatian utama. Hal ini tentu saja terkait dengan keinginan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Oleh karena itu di Kabupaten Klaten, dalam prioritas Pembangunan Daerah Klaten pada tahun 2011 Pendidikan menempati urutan pertama. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah tahun 2011:

“ dalam poin pertama, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, dengan mengacu pada penekanan penuntasan WAJARDIKNAS 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun pengembangan mutu, kompetensi dan standarisasi pendidikan yang sama di semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah, pengembangan

¹³ Ibid

keterkaitan antara dunia pendidikan dan usaha, kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pendidikan ¹⁴

Dan dengan itu, secara otomatis rencana pengembangan ini akan mengikut sertakan juga dunia pendidikan tingkat SMP sebagai bagian dari WAJARDIKNAS 9 tahun.

Salah satu persoalan pokok yang dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Klaten, hal ini dengan mengacu pada Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 pada poin ke 6 tentang WAJARDIKNAS. Dimana disitu dikatakan bahwa, jika pada Tingkat Provinsi pelayanan pada bidang pendidikan yang belum mencapai hasil kualitas maksimal. Dimana masih rendahnya akses untuk masyarakat miskin dalam menikmati pelayanan pendidikan, rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan. ¹⁵

Sementara pada tingkat Kabupaten, bentuk masalah yang disebut adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan ketuntasan WAJAR 9 tahun serta keberlanjutan sampai WAJAR 12 tahun.

D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bidang Pendidikan membahas tentang alokasi anggaran dari APBD

¹⁴ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten Bpk Drs. Pantoro,MM. Tanggal 5 Mei 2011, Pukul 09.45 Wib

¹⁵ RPKD 2011. Kab. Klaten

Kaupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Hal ini sebagaimana di bawah ini:

“Dalam Musrenbang dibahas tentang prioritas kegiatan yang akan di berikan dana kegiatan. Akan tetapi sebelumnya di pilah berdasarkan dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bentuk penetapan Rancangan RKPD Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan”.¹⁶

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), didahului dengan penjelasan dan diskusi draft RKPD oleh Kepala Bappeda Kabupaten Klaten kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menjelaskan RPPK kemudian selanjutnya melahirkan bahan RKPD Bidang Pendidikan untuk diajukan oleh pihak eksekutif untuk dibahas bersama legislative.

E. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan untuk SMP

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rancangan pembiayaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah :

a. Kebutuhan Operasional Sekolah

Alokasi kebutuhan sekolah seperti keperluan operasional pengajaran, operasional administrasi dan perkantoran, operasional laboratorium, operasional perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Bappeda Hari Budiono. SH.MH Kabupaten Klaten Tanggal 7 Mei 2011, Pukul 09.00 Wib

penggantian barang barang mendesak, kebersihan dan kesehatan dapat diidentifikasi oleh kepala sekolah bersama masyarakat dan pemerintah.

Terbelenggunya kreatifitas kepala sekolah karena kaku dan sentralistiknya birokrasi pendidikan, tidak bisa diharapkan ada inovasi baru dari sekolah, semata mata bukan karena SDM-nya yang rendah, tetapi karena system tidak mendukung atau memberi ruang gerak untuk kreatifitas dan inovasi.

Akan tetapi dengan adanya desentralisasi pendidikan diharapkan mampu memberikan pengaruh yang kuat bagi keberlangsungan pendidikan.

b. Kebutuhan Siswa

Untuk memenuhi kriteria dan kebutuhan siswa memang mahal, karena dibutuhkan dukungan biaya dan SDM yang mengurusnya. Karena faktor mutu merupakan faktor utama dalam menentukan perbedaan antara masyarakat terbelakang dan masyarakat maju. Maka investasi untuk keperluan pendidikan dan sekolah amat diperlukan sebagai prioritas, karenanya kepala sekolah harus menghitung tiap item kebutuhan sekolah, dan mengalokasikan anggarannya kemudian mengatur strategi untuk pemenuhannya.

Hal ini diakui oleh Bapak Kepala Sekolah Karsidi :

“.....memang jika kita melihat sekilas, tentunya kita mengakui bahwa, dana yang dibutuhkan untuk menanggung biaya program serta kebutuhan siswa sangat mahal. Akan tetapi jika dengan semaksimal mungkin pemerintah lebih serius, dengan merangkul masyarakat dan

*tingkat satuan sekolah sendiri dalam Komite Sekolah hal tersebut bisa tercapai dengan baik,*¹⁷

Akan tetapi dilanjutkan oleh beliau:

*“jika hal ini bisa terjadi tentunya ada potensi besar untuk siswa khususnya SMP mengembangkan potensi diri mereka.”*¹⁸

c. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan

Kebutuhan akan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan, merupakan unsur mutlak yang harus tersedia, makanya perlu diperlukan perencanaan biaya, analisis biaya, serta alokasinya.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H Suhartono SPd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wedi, perihal pendayaan sumber pembiayaan, :

*Dengan adanya kucuran dana bantuan ke Sekolah, bentuk kegiatan yang akan di lakukan disekolah mampu berjalan dengan maksimal. Artinya bahwa, perencanaan biaya yang telah kita lakukan sehubungan dengan program sekolah mampu segala sarana dan prasaran yang dibutuhkan sehubungan dengan program yang diadakan di sekolah.*¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Karsidi, tanggal 6 Mei 2011, Pukul 11.23 wib

¹⁸ Ibid

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Suhartono SPd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wedi Klaten, tanggal 13 September 2011. Pukul 10.24 wib

Kemudian beliau melanjutkan,

*.....agar semua dana anggaran bisa digunakan dengan baik serta mencapai sasaran, maka kami melakukan sebelumnya perencanaan biaya atas program program yang ada, berikut analisis biaya alokasinya.*²⁰

d. Prioritas Pembiayaan

Pada tingkat satuan sekolah yang ada, tentunya telah melakukan prioritas sehubungan dengan potensi yang akan dikembangkan oleh sekolah tersebut.

Akan tetapi, penggunaan biaya yang tidak perlu harus dihindari. Oleh karena itu biaya diarahkan untuk proses belajar mengajar. Sebagai kegiatan pokok sekolah. Efektifitas pembiayaan sebagai alat ukur efisiensi, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu.

*“...dengan melihat potensi yang bisa dikembangkan ditingkat SMP, tentunya bagi sekolah-sekolah berhak untuk melakukan prioritas pengembangan pendidikan yang berlaku dalam sekolah mereka, misalnya pada kreatifitas karya seni, kerajinan tangan, bahkan hingga konveksi kalau perlu”*²¹

Dinas Pendidikan dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam menangani masalah pendidikan, terlebih dengan adanya desentralisasi pendidikan memperoleh anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten.

²⁰ Idem,

²¹ Wawancara dengan Bapak Karsidi tanggal 6 Mei 2011, pukul 11.35

Dilihat dari sumbangan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara signifikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2005 PAD sebesar Rp 33.857.400.00,- (4,74%), tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 35.864.700.00,- (4,83%), pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 42.620.328.00,- serta pada tahun 2008 terealisasi sebesar Rp 49.772.710.99,-serta pada tahun 2009 terealisasi sebesar Rp 54.398.617.276,- dan pada APBD tahun 2010 direncanakan sebesar Rp 71.371.000.000,-.²²

Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah disebabkan makin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah disertai pengalihan porsenil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi dalam jumlah besar (Sidik, 2002: 27). Sumber penerimaan daerah yang potensial, seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini menjadi unsur utama PAD yang harus digali secara maksimal dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan itu menjadi potensi yang besar untuk mendongkrak bangkitnya dinamika pendidikan yang maksimal dan serta yang diharapkan.

Berikut data Jumlah Anggaran Pendidikan yang berasal dari APBD Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010/2011:

(Dalam Ribuan Rp)

No.	Jenis Anggaran	Jumlah
1.	2.	3.
01.	Anggaran Pendidikan seluruh (Disdik dan UPTD)	114.037.092
02.	Anggaran TK (PAUD Formal)	195.249
03	Anggaran SD/MI	292.813
	1. Anggaran SD	292.813

²² Rencana Kerja Pemerintah Daerah Klaten. RKPD 2011.kabupaten Klaten. hlm 15-16

	2. Anggaran MI	0
04	Anggaran SMP/MTs	113.915.758
	1. Anggaran SMP	113.915.758
	2. Anggaran MTs	0
05	Anggaran SM/MA	61.009.157
	1. Anggaran SMA	39.221.417
	2. Anggaran MA	0
	3. Anggaran SMK	21.787.740
06	Anggaran Keaksaraan Fungsional	300.000
07	Anggaran PAUD (PAUD Non-Formal)	0
08	Anggaran Kesetaraan (Paket A,B, dan C)	350.000
09	Anggaran Khusus	50.000

Sumber Profil Pendidikan Kab. Klaten

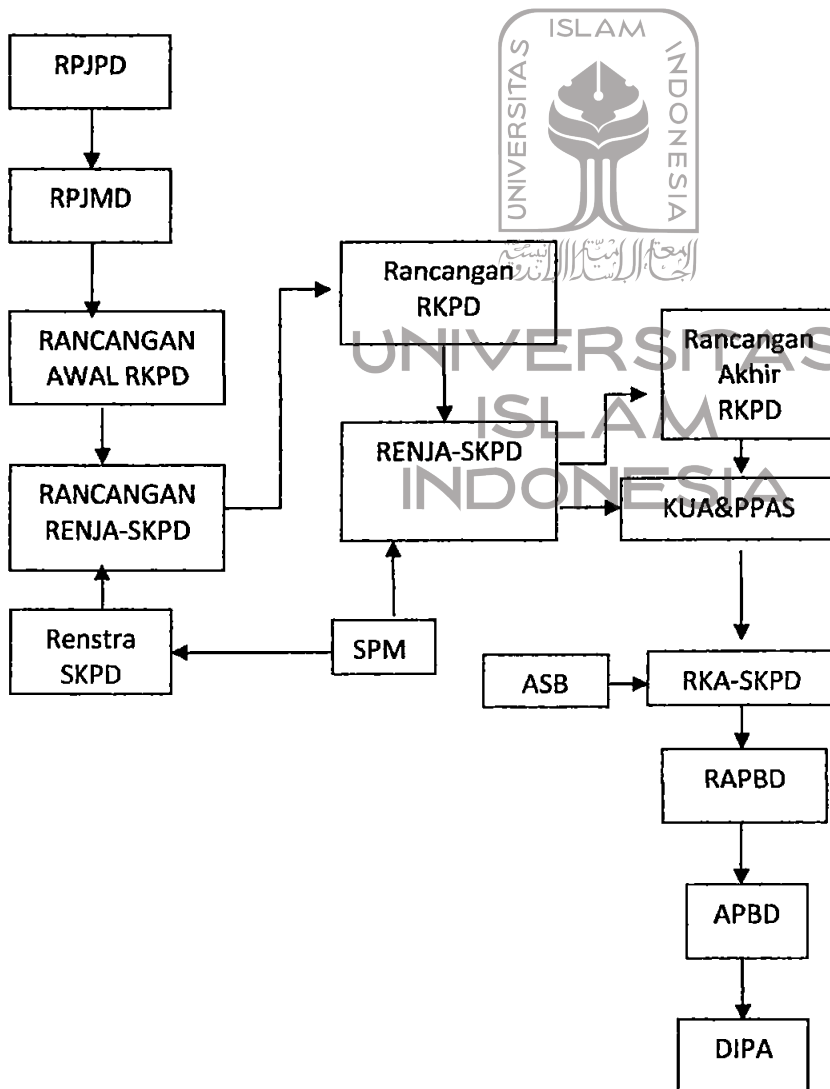
Dari data yang diperoleh di atas terlihat anggaran pendidikan yang diperoleh sekolah tingkat SMP adalah Rp 113.915.758,-. Dari anggaran yang ada itu, setidaknya satuan pendidikan tingkat SMP mampu memberikan gebrakan untuk mampu mencapai hasil yang maksimal. Kelengkapan sarana dan prasarana selayaknya menjadi focus utama, sehingga dengan itu mampu melahirkan produk manusia yang bermutu.

Dalam hal anggaran biaya pendidikan untuk Kabupaten Klaten bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan Partisipasi masyarakat. Dalam hasil evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD sebelumnya, terkait dengan berbagai program di bidang pendidikan. Sebagai pelaksana bidang ini, dari kebijakan Dinas Pendidikan Klaten persoalan pendidikan diarahkan pada: peningkatan pendidikan, dan kesinergian antara pendidikan dan dunia usaha. Termasuk juga perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu, peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme, serta kesejahteraan para tenaga kependidikan dll.

Alur anggaran Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Klaten untuk SMP mengikuti proses perencanaan anggaran untuk Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Kabupaten Klaten. menurut Ibu Lies :

“...hampir sama, yaitu mengacu pada proses Perencanaan Pembangunan Pendidikan pada umumnya. Kan, SMP juga masuk dalam bagian itu....”²³

Skema alur penganggaran digambarkan dalam skema berikut:



²³ Ibu Lies Tanggal 3 Mei 2011, pukul

Terkait pembiayaan pendidikan tingkat SMP, Bapak Karsidi mengatakan :

“ khusus untuk tingkat SMP misalnya, banyak yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke SMA (dan setingkatnya.Pen). Karena persoalan biaya, atau karena keinginan sendiri. Tapi yang jadi masalah, untuk dilihat adalah kesiapan mereka. Apakah mereka memang telah siap..

Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau,:

*”Bukan kita tidak mendorong mereka.. Tetapi sebagai antisipasi tingkat putus sekolah karena kurangnya biaya, sebaiknya, bentuk perhatian khusus pada keterampilan harus ditingkatkan. Artinya harus ada perhatian atau programlah, yang benar-benar mendukung kreatifitas mereka”.*²⁴

Memang patut untuk diperhatikan bahwa persoalan melanjutkan pendidikan setelah melewati pendidikan 9 tahun, haruslah diserahkan dengan sepenuhnya bagi para siswa. Akan tetapi ini, bisa dilakukan jika pada tingkat SMP telah tersedia berbagai sarana dan prasarana yang mampu mendukung kreatifitas mereka atau fasilitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk berkarya dalam masyarakat.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Karsidi, tanggal 6 Mei 2011, Pukul 10.00 wib

F. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Pendidikan khusus SMP di Kabupaten Klaten

Selama proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di Klaten, terdapat berbagai dinamika yang harus dihadapi oleh tim dari Dinas Pendidikan Klaten. Hal tersebut boleh menjadi sebuah masalah yang rumit atau boleh jadi kemudahan bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kendala ini, juga merupakan bagian yang cukup rumit dalam usaha melakukan pembangunan pendidikan. Selain itu, persoalan di tingkat sekolah juga masih ada.

1. Faktor Penghambat Perencanaan dan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Klaten

Dalam proses perencanaan dan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Klaten, terdapat proses yang tidak sederhana. Koordinasi di berbagai tingkat yang ikut andil dalam proses perencanaan tersebut, harus terus terjalin. Keabsahan dan tepatnya data menjadi patokan utama untuk mencapai bentuk perencanaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia pendidikan di Kabupaten Klaten.

Persoalan data sebagaimana diutarakan oleh Ibu Lies kadang menjadi hambatan dalam mengkaji kembali hasil laporan RPS dari sekolah.

“ hambatan yang seringkali dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam melihat kembali hasil RPS berupa adanya ketidaklengkapan data dan ketidaksesuaian data yang ada ”²⁵

Dengan persoalan ini, tentunya pengkajian lebih lanjut di Dinas Pendidikan sebagai tindak lanjut atas RPS menjadi terhambat, bahkan terjadi kekeliruan saat menentukan hasil rancangan perencanaan pembangunan pendidikan di Klaten.

Akan tetapi dari yang penulis temui, sehubungan dengan proses perencanaan pendidikan, di SMP Negeri 1 Delanggu, bahwa dengan desentralisasi rupanya justru melahirkan adanya ketidak sinkronan antara program sekolah dengan DPA, menurut Ibu Sawiji, SPd, MM:

“.....pengelolaan dana blockgrand RSBI dari APBD I menjadi satu dengan DPA Satker Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sehingga kegiatan sekolah tidak sesuai dengan DPA yang ada”²⁶

Mencermati hal diatas, bahwa adanya ketidak sinkronan itu menjadi indikasi bahwa terdapat hubungan kerja yang tidak baik , antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah. Khususnya dalam melakukan perancangan anggaran dalam menjalankan program sekolah. Dengan menciptakan ruang koordinasi yang baik tentu bisa mengatasi masalah ketidak sinkronan diatas.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Lies, Tanggal 2 Mei 2011 pada pukul 10.30

²⁶ Wawancara dengan Ibu H Sawiji, SPd, MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Delanggu, pada tanggal 13 September 2011, pada pukul 12.20

Dalam hal ini, pemerintah Klaten diwakili oleh mereka yang ada dalam keanggotaan komite sekolah untuk lebih aktif dan lebih tanggap dalam melihat usaha-usaha lembaga sekolah dalam berbenah.

2. Faktor Pendukung Perencanaan dan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Klaten

Selain faktor penghambat terdapat juga faktor pendukung, sebagai penunjang lancarnya proses perencanaan pembangunan pendidikan dinas pendidikan Klaten. Tentu saja hal menjadi harapan semua guna mendapatkan proses perencanaan yang matang dan akurat. Salah satu faktor pendukung proses perencanaan pembangunan Pendidikan khusus SMP di Klaten adalah dengan adanya desentralisasi pendidikan.

Secara perlahan-perlahan desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan bagi dinas pendidikan kabupaten untuk melakukan berbagai inovasi dibidang pendidikan, yang tentunya telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan bentuk pendidikan yang dibutuhkan di Kabupaten Klaten.

Hal ini diutarakan oleh Ibu Lies dalam wawancara penulis :

"...setidaknya dengan adanya desentralisasi pendidikan, pendidikan di kabupaten Klaten mampu mendapatkan efek sekitar 30-40%. itu bisa kita lihat pada kemampuan Dinas Pendidikan Kab

Klaten yang mengalami peningkatan untuk melakukan inovasi sebagai penyesuaian atas kondisi masyarakat yang ada di Klaten sendiri."²⁷

Kemudian lebih lanjut disampaikan oleh beliau bahwa:

" pemberian kebebasan di tiap-tiap sekolah di Klaten dalam penentuan kurikulum MULOK di sekolah masing-masing. Misalnya pelatihan kerajinan atau konveksi (mengingat Klaten termasuk kawasan yang unggul dalam bidang tekstil) dan lain-lain. Serta bentuk penyajian atau penyampaian pembelajaran dengan metode PAKEM dan lain-lain merupakan efek atas berlakunya desentralisasi Pendidikan."²⁸

Hal ini berkaitan dengan bentuk system sentralisasi sebelumnya yang mana kebijakan soal pendidikan terpusat pada lembaga pemerintahan di Jakarta. Secara otomatis melahirkan jarak yang lebar antara kebutuhan pendidikan yang seharusnya di daerah dengan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Tentu saja hal ini terjadi dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintahan pusat dalam menangani semua persoalan yang ada di daerah, lebih lagi yang terkhusus pada tingkat SMP. Dengan adanya desentralisasi tentunya memudahkan koordinasi antara pihak satuan sekolah dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi tiap tiap sekolah untuk menata diri lebih baik, dengan membentuk program program dan perencanaan yang memang betul betul

²⁷ Wawancara dengan Ibu Lies, Tanggal 2 Mei 2011 pada pukul 10.45

²⁸ Wawancara dengan Ibu Lies, Tanggal 2 Mei 2011 pada pukul 10.45

diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik hingga mencapai hasil didik yang diharapkan oleh masyarakat.

Berkenaan dengan itu, maka di tingkat SMP setidaknya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu menunjang ragam kegiatan, semisal kegiatan ekstrakurikuler atau bidang khusus lainnya. Karena dengan itu pendidikan di tingkat SMP akan dengan sendirinya terdorong untuk terus mampu meningkatkan kualitas belajarnya.

Jadi kemandirian di tingkat sekolah menjadi faktor utama untuk mencapai bentuk perencanaan pembangunan pendidikan untuk mencapai kesesuaian bentuk program pendidikan yang selaras dengan aspirasi masyarakat secara umum.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menimbulkan suatu konsekuensi, yaitu daerah harus mampu mengembangkan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Kemampuan keuangan untuk menggali sumber pembiayaan dan pengelola dalam rangka membelanjakan sangat menentukan pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengelolaan/penggunaan uang sudah

seharusnya dilimpahkan ke sekolah. sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan "kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan" (*income generating activities*) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

Memang kadang kadang pengelolaan pendidikan harus dilihat sebagai bentuk usaha produksi, mengingat banyaknya persoalan persoalan yang berhubungan dengan pembiayaan dalam melakukan pengembangan di tiap tiap sekolah. Namun dengan menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Oleh karena kondisi dan potensi sekolah SMP di Kabupaten Klaten berbeda-beda antara satu dengan lainnya, maka alternatif langkah-langkah pemecahan

persoalannya pun dapat berbeda, disesuaikan dengan kesiapan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya di sekolah tersebut.

Dengan demikian sekolah secara mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil pengkajian dari data dan analisis yang dilakukan maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa:

Adapun dalam Mekanisme perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar diawali dengan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) oleh pihak sekolah dan Komite Sekolah. Kemudian RPS tersebut diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten bersama Dewan Pendidikan untuk mengetahui kesesuaian antara RPS dengan dokumen RPJMD. Setelah dilakukan verifikasi, RPS tersebut oleh Satgas Perencana disusun menjadi Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPPK). Selanjutnya RPPK dipaparkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Dari hasil yang diperoleh Musrenbang ini adalah RKPD Kabupaten termasuk didalamnya RPKD Bidang Pendidikan. Alokasi anggaran APBD dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang tertuang dalam RPKD bidang pendidikan. Dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten dilakukan dari satuan tingkat bawah, dimana mengacu pada bentuk laporan RPS dari sekolah-sekolah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis atas apa yang menjadi pokok pembahasan dalam Tesis ini, dengan itu kami mengajukan beberapa saran terkait dengan pembangunan pendidikan:

1. Proses pembangunan yang maksimal khususnya dalam dunia pendidikan setidaknya memang harus mengikutkan berbagai pihak untuk ikut dalam pembahasan, bahkan masyarakat harus terus ikut dalam memberikan partisipasi dalam pengembangan pendidikan. Hal ini demi terciptanya keselarasan dalam kinerja Dinas Pendidikan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat
2. Demi kelangsungan pembangunan dalam masyarakat, perhatian Pemerintah Kabupaten pada tingkat SMP seharusnya menjadi perhatian penuh. Mengingat tingkat putus sekolah yang terjadi di SMP akan menciptakan sumber daya manusia yang kelak akan mengalami banyak kesulitan hidup. Hal ini dikarenakan pada tingkat SMP, bentuk pendidikan belum bisa di andalkan sebagai usaha dalam menciptakan sumber daya manusia yang kreatif.

Demikian karya tulis ini kami buat, diharapkan kelak dengan maraknya perhatian masyarakat bagi dunia pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Klaten.

Selain itu, bagi penulis sendiri, apa yang ada dalam tulisan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, tetap masih membutuhkan banyak sokongan atau kritik untuk mencapai hasil yang lebih baik.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armodiwirio, Soebagio. 2005. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Ardadizya Jaya.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten Tahun 2009. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta : Erlangga
- Coombs. Philips H. 1987 *Apakah Perencanaan Pendidikan itu*. Terjem; Istiwidayanti. Jakarta. Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung : Citra Umbara.
- Fahmy Badoh, Ibrahim. Kumpulan Tulisan, *Prospek Ekonomi Indonesia Berbasis Sektoral “, dalam Eko Setia Budi“ Anggaran Kinerja dan Korupsi Anggaran*
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metode Research II*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hamid, Edy Suandi dan Sobirin Malian. 2005. *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Kumpulan Tulisan. Yogyakarta: UII Press.
- Hamijoyo, Santoso S. 1999. *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan*. Malang. FIP UNM
- Handoyo, Wahyu. Dkk. 2005. *Kebijakan Pendidikan Dasar*. Jakarta : United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR).
<http://m-ali.net/?p=73>
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten*. 2009. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.

- Juhad, M. 2007. *“Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Berdasarkan Kemampuan Daerah (Kajian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Daerah Kabupaten Lombok Timur, NTB)*. Malang : Program Pasca Sarjana Univesitas Brawijaya.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997 *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Cet- XXI. Pengantar : Bintoro Tjokroamidjojo. Jakarta : LP3ES
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Kementrian Pendidikan Nasional RI. 2010. <http://www.kemdiknas.go.id/satuan-pendidikan/sekolah-menengah-pertama.aspx>). Diakses tanggal 14 Mei 2011, pukul 02.45 WIB
- Koswara, Ekom. 1996. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut UU No. 5 Tahun 1974*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mattehew B. Miles dan A.Michael Huberman. 1992 *Analisa Data Kualitatif*. Terjemah Tjejep Roehendi. Jakarta UIP.
- Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008. PUSDATIN BAPENAS.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 7 tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Klaten 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007 – 2009. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Jakarta.
- Pidarta ,Made. 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia* . Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten. 2009. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi ke III. Cetakan III. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Klaten. RKPD 2011. Kabupaten Klaten
- Riyadi dan Brata Kusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta; PT Gramedia
- Sobri. M. 2010. Tesis. *Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP 1 Biromaru Kabupaten Sigi*. UII Yogyakarta
- Soeparmoko. 1991. *Keuangan Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE.
- Staveren, J. M. and D.B.W.M. van Duseldrop. 1980. *Framework for Regional Planning in Developing Countries*. Netherland : Internasional Institute for Land Reclamation and Improvement
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Babun dan Zainal Abidin. 2010. *Konstruksi Ideal Pendidikan Islam dalam Spektrum Global, Pertautan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)*. Yogyakarta : Absolute Media.
- Tilaar .H.A.R. 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan; *Pengantar Pedagogik Transformasi Untuk Indonesi.*, Jakarta: Grasindo
- . 2004. *Multikulturalisme: Tantangan tantangan Global Masa Depan dalam Tranformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo.
- Todarop, Michael. 1985. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia ke Tiga. III*. Terjemh, Burhanuddin Napitupulu. Jakarta : Erlangga.
- Uno, Hamzah. B. 2007. *Metode Pembelajaran*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- www.bappenas.go.id. 2010. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. PUSDATIN BAPENAS.
- www.solopos.com /Klaten/2010